

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**REFERENDUM TAHUN 1999 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP TIMOR-TIMUR**

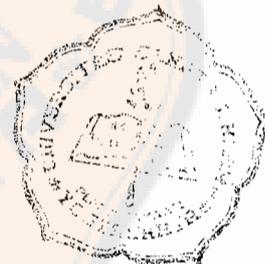
SKRIPSI

**DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**



DI SUSUN OLEH

JOAO FUCA
NIM : 971314011
NIRM : 000971314011



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2005**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
REFERENDUM TAHUN 1999 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP TIMOR-TIMUR

Oleh
Joao Fuca
NIM : 971314011

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH

tanggal...21-2-2005

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo J.R

tanggal...21/2-2005

SKRIPSI
REFERENDUM TAHUN 1999 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP TIMOR-TIMUR

Dipersiapkan Oleh
Joao Fuca
NIM : 971314011

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 31 Januari 2005, dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Adisusilo J.R.
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd
Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH
Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
Anggota : Drs. A.A Padi



Yogyakarta, 31 Januari 2005
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma




Slamet Soewandi, M.Pd

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dengan Ujung Sangkurmu, Kau Menggores Segala Kejahatan yang Pernah Kau Lewati.

Dengan Ujung Sangkurku Ku Mengukir Sejarah Pembebasan Tanah Airku.

(F. Borja Da Costa)

Ketika Kediktatoran Menjadi Kenyataan, Maka Revolusi Menjadi Kebenaran yang Mutlak.

(Che Guevara)

Jangan pernah mengatakan tidak, tetapi berjuanglah untuk menghadapi kenyataan.

(Joao Fuca)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- 1). Seluruh Masyarakat Timor Lorosa'e
- 2). Ayah (Alm) dan ibuku tercinta
- 3). Bapak dan Ibu Permandianku
- 4). KeenamSaudaraku
- 5). Kekasihku Veronica Uum Kusrini
- 6). Seluruh keluarga besar Naimeco
- 7). Yayasan Kolese Santo Yoseph Dili
- 8). Yayasan Purba Danarta Semarang

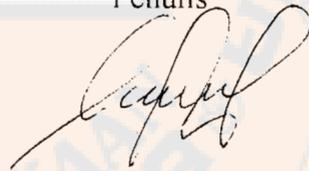
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYA TAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini, tidak memuat karya atau bagian dari orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta... 31/1/2005

Penulis



Joao Fuca

ABSTRAK
REFERENDUM TAHUN 1999 DAN DAMPAKNYA TERHADAP TIMOR-TIMUR

Joao Fuca
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Skripsi ini yang berjudul: “Referendum Tahun 1999 dan Dampaknya Terhadap Timor-Timur,” bertujuan untuk membahas empat permasalahan. Pertama, Bagaimana Latar Belakang politik terjadinya Referendum tahun 1999 di Timor-Timur ?. Kedua, Mengapa proses Referendum tahun 1999, begitu cepat di Timor-Timur ?. Ketiga, Apa Dampak Referendum tahun 1999 terhadap Timor-Timur, dalam bidang ekonomi dan sosial budaya ?. Dan keempat, Bagaimana sikap dan kebijakan PBB terhadap Referendum tahun 1999 yang terjadi di Timor-Timur ?

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, menggunakan metode sejarah. Adapun sebagai langkah-langkah penulisan dalam metode sejarah tersebut mencakup; Pengumpulan data (heuristik), Kritik sumber (Verifikasi), Interpretasi dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, pendekatan historis, politis dan sosiologis

Hasil yang dapat diperoleh dalam penulisan Skripsi ini, adalah bahwa selama kurang lebih 24 tahun, Pemerintah Indonesia menduduki wilayah jajahan portugis, yang belum mendapat tanggapan positif dari Dunia Internasional atau PBB. Indonesia juga gagal dalam merangkul masyarakat Timor Lorosa'e terutama kelompok FRETILIN, serta gagal dalam menggalang diplomasi di forum Internasional mengenai status Timor-Timur. Terjadinya Referendum tahun 1999 di Timor-Timur, bukan merupakan hadiah dari Pemerintah Indonesia, akan tetapi dapat diperoleh melalui suatu perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan. Selain itu juga, Indonesia mendapat tekanan dari dunia Internasional, mengenai di tegakannya Hak Asasi Manusia di wilayah tersebut.

ABSTRACT

**A REFERENDUM IN 1999 AND ITS IMPACT TOWARD
EAST TIMOR**

**By
JOAO FUCA**

**SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA**

This Sarjana Degree Thesis titled " A Referendum in 1999 and Its Impact toward East Timor", was aimed to discuss four problems. The first, How was the political background on the happen of Referendum in East Timor 1999 ? The second, why the implementation process of referendum in there was so fast ? The third, what was the impact of this referendum toward East Timor in the sector of economy, social culture ? and the fourth, how were the attitude and policy of United Nations toward the referendum occurred in East Timor 1999 ?

This writing method used in this thesis was the historical method. There were also the steps of writing in it included the collecting data (theoretic, critical source (verification), interpretation, and historiography), while the approaches used in this writing were the historical, political, and sociological ones.

The result obtained from this thesis indicated that for less than more 24 years, Indonesian Government occupied the territory of Portuguese's colony that was not already to get the positive respect from the international world or UN. Indonesia also failed to embrace the people of Timor Lorosae, manly the party of Fretilin, and it failed to support the diplomacy in the International forum on the status of East Timor. The happen of Referendum in East Timor 1999 was not the gift from Indonesian government, but could be obtained from a long-enough and vary tired struggle. Beside that Indonesia got the pressure from the international world on the enforcement of human rights at the territory.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan anugerahnya, berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Referendum tahun 1999 dan Dampaknya Terhadap Timor-Timur. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana jurusan ilmu Pengetahuan Sosial, Program studi Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini selesai tidak mungkin tanpa ada yang mendampingi, membimbing, memberi bantuan dan perhatian. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang telah memberi ijin ataspenulisan Skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberi motivasi dalam penulisan Skripsi ini, serta membimbing penulis dalam melaksanakan tugas studi.
3. Bp. Prof. Dr. P.J Suwarno, SH selaku Dosen pembimbing I yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing serta memberi koreksi yang bersifat membangun, sehingga Skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bp. Drs. Sutarjo Adisusilo, JR selaku Dosen pembimbing II dan selaku Dosen pembimbing Akademik, yang penuh perhatian membimbing dan memberi koreksi yang bersifat membangun pula, sehingga Skripsi ini selesai dengan sempurna.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Para Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah banyak memberi masukan sebagai bekal pengetahuan dan bimbingan bagi penulis selama menempuh tugas belajar.
6. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma atas pinjaman buku-buku dari sejak kuliah hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Pustaka yayasan HAK dan FORTILOS, Talitakum dan CAVR Timor Lorosa'e, yang telah memberi ijin untuk meminjam dan menggunakan majalah-majalah dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara Joaquim Fonseca yang telah meluangkan waktunya untuk memperoleh informasi melalui wawancara.
9. Yayasan Kolese Santo Yoseph Dili Timor Lorosa'e yang dapat memberikan dukungan, baik secara moril, keuangan, motivasi, arahan, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Sanata Dharma yogyakarta.
10. Teman-teman sedaerah, Joao B.F Cabral, Elvis Oliveira, Savio, Cancio, Roger dan Claudia yang dapat mendukung penulis dengan meminjamkan buku sumbernya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma; Duto, Marta, Joice, Prawoto, Lucas, Daniel, Aris, Dimas serta seluruh teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah, yang tidak disebutkan satu persatu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12. Kekasihku Veronica Uum Kusrini yang dengan setia dan sabar, memberi motivasi, mendampingi dalam suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Seperantauan Timor Leste; Joao B.F Cabral, Elvis Oliveira, Aje, Nando, Emerenciana Marques, Merry Boquifa'I, Neuza Delima, Ameta Bano, Demis, Osorio, Tobias, Antonio, Nene, Mimin, Ivodio, Martinho, Luis Gonzaga, Roberto, Amalia dan teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu, yang dapat memberikan semangat dan motivasi.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus memberikan kemurahan-Nya kepada pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima baik kritik maupun saran, yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja yang menaruh minat terhadap masalah Timor Lorosa'e.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka.....	14
F. Dugaan Sementara.....	19
G. Metode Penelitian dan Pendekatan	21
H. Sistem Penulisan	26



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II REFERENDUM TAHUN 1999 DI TIMOR-TIMUR

A. Timor-Timur di Mata Dunia Internasional	27
1. Amerika Serikat.....	32
2. Australia	34
3. Portugal	36
4. Vatikan	37
5. PBB.....	40
B. Timor-Timur Di Mata RI	42
C. Timor-Timur di Mata Orang Timor-Timur.....	35

BAB III PELAKSANAAN REFERENDUM TAHUN 1999 DI TIMOR-TIMUR

A. Indonesia	51
B. Timor-Timur.....	54
C. PBB.....	58

BAB IV DAMPAK REFERENDUM TAHUN 1999 DI TIMOR-TIMUR

A. Dampak Bagi Indonesia	62
1. Bidang Politik.....	62
2. Bidang Sosial Ekonomi.....	66
B. Dampak Bagi Timor-Timur	69
1. Bidang Politik.....	69
2. Bidang Sosial Ekonomi	76
C. Dampak Bagi Kaum Pendatang	80

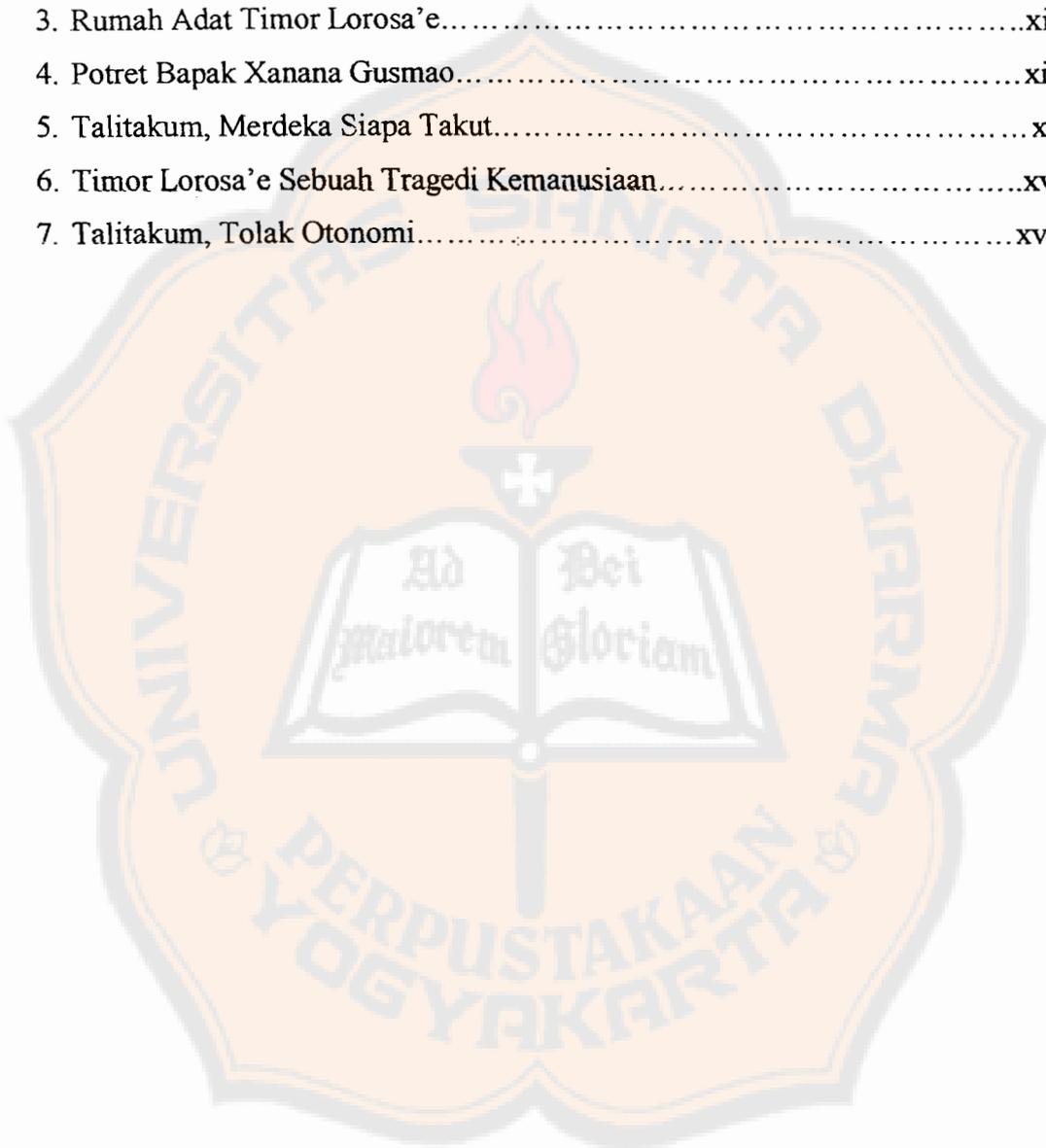
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V SIKAP DAN KEBIJAKAN PBB TERHADAP REFERENDUM TAHUN 1999 DI TIMOR-TIMUR

Kebijakan Terhadap Orang Timor-Timur	85
A. Amerika Serikat	86
B. Jepang	87
C. Portugal	88
D. Australia	90
E. PBB	94
BAB VI KESIMPULAN	95
DAFTAR PUSTAKA	99
A. Sumber Primer	100
B. Sumber Sekunder	101
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Silabus dan Sistem Pengujian.....	xi
2. Peta Timor Lorosa'e.....	xii
3. Rumah Adat Timor Lorosa'e.....	xiii
4. Potret Bapak Xanana Gusmao.....	xiv
5. Talitakum, Merdeka Siapa Takut.....	xv
6. Timor Lorosa'e Sebuah Tragedi Kemanusiaan.....	xvi
7. Talitakum, Tolak Otonomi.....	xvii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Kerikil dalam Sepatu” itulah ungkapan yang sering diucapkan oleh Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas tentang masalah Timor-Timur. Pasang surut persoalan Timor-Timur semasa kepemimpinan Ali Alatas, memang begitu mewarnai diplomasi Indonesia di dunia internasional. Konflik politik Timor-Timur telah berjalan kurang lebih 24 tahun. Tentu sebuah perjalanan yang cukup melelahkan dan merugikan setiap dan semua pihak yang telah dan sedang terlibat, baik secara sadar maupun tak sadar didalamnya. Faktor utama yang dapat menyebabkan konflik tersebut adalah saat Portugal meninggalkan bekas jajahannya (TimTim) begitu saja tanpa merasa bertanggungjawab. Padahal pertikaian antar saudara pasca hengkangnya Portugal, merupakan masalah mendasar ditanah jajahannya. Sebab pertikaian usai keluarnya Portugal, merupakan dasar munculnya faksi-faksi di Timor-Timur. Faksi-faksi inilah yang selanjutnya memilih jalan tersendiri terhadap masa depan wilayah jajahan Portugal.¹

Faktor lain yang juga tidak kalah penting dalam menumbuhkan konflik politik di Timor-Timur adalah keilegalan kekuasaan Indonesia di Timor-Timur. Sebuah kekuasaan yang sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan

¹ *Majalah Republik, Lepasnya Kerikil Dalam Sepatu, Mei 19 2002, hlm. 3*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hukum internasional yang telah diakui masyarakat dunia semenjak masyarakat itu mengikatkan diri dengan apa yang dinamakan “kontrak sosial.”

Keilegalan kekuasaan Indonesia di Timor-Timur, dimulai atau ditandai dengan diinvasinya wilayah itu secara membabi buta oleh TNI pada minggu, 7 Desember 1975. Sebuah invasi yang dapat memaksa Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 10 Resolusinya (sejak 1975- 1982). Resolusi yang pada intinya mengutuk invasi militer dan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik Pasukannya tanpa syarat, serta menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Timur²

Pada prinsipnya, di negara demokratis yang berkedaulatan rakyat seperti Indonesia, ada dua kemungkinan kriteria legitimasi terhadap wewenang dan kekuasaan penguasa atas masyarakat dan wilayah yang dikuasainya. Kedua prinsip legitimasi itu adalah: legitimasi sosiologis dan legitimasi legal. Bagaimana dengan kekuasaan Indonesia di Timor-Timur ? Dari kedua kriteria di atas, dapat ditinjau dari dua aspek. Kedua aspek tersebut antara lain:

a. Aspek sosiologi.

Kekuasaan Indonesia atas Timor-Timur yang diawali dengan invasi militernya pada 7 Desember 1975, pada dasarnya tidak memiliki legitimasi sosial. Karena akibat situasi perang saat itu, de facto kurang lebih 85% masyarakat dan wilayah Timor-Timur masih dikuasai oleh Pemerintahan Republik Demokratika Timor Leste (RDTL) tahun 1975-1979, sehingga tidak memungkinkan untuk memperolehnya legitimasi dari masyarakat Timor-

² Jurnal *GEVATIL*, “Referendum (Otonomi Bagian dari RI) atau Merdeka (Menjadi Negara Berdaulat)”, 1999. hlm.22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Timor, guna menyatakan penggabungan wilayahnya kedalam NKRI. Menggunakan alasan bahwa mandat dapat diperoleh dari para elit empat(4) partai politik yang ada di Timor-Timur pada saat itu, yakni UDT, Apodete, KOTA dan Trabalista kecuali FRETILIN, sehingga dapat dikategorikan bahwa elit politik empat partai politik tersebut sudah mewakili aspirasi mayoritas masyarakat Timor-Timur, bukanlah alasan logis-ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Juga terhadap apa yang disebut dengan Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSTT), yang dapat dibentuk Jakarta setelah invasi militernya.

Jikalau para politisi dan diplomat baik Timor-Timur maupun Indonesia masih menggunakan alasan tersebut sebagai dasar legitimasi sosiologis, maka dari para elit politis tersebut, tidak perlu lagi berkampanye dalam setiap kali Pemilu. Namun di antara partai yang ada, misalnya PRD, PUDI, PND, PKD, PNI, PID, PARI dan Partai kecil lainnya mengakui diri sebagai pemenang tanpa melalui Pemilu. Tentu yang akan terjadi adalah delapan Partai (8) lainnya seperti; PDI Perjuangan, PAN, PKB, PPP, Golkar, PBB, Partai Keadilan dll, akan berang dan menyatakan partai-partai kecil tersebut tidak memiliki dukungan mayoritas masyarakat Indonesia untuk membentuk Pemerintahan, karena belum terbukti memiliki dukungan dari mayoritas rakyat. Kebersamaan mereka sama dengan penentangan kelompok masyarakat Timor-Timur yang Pro-Kemerdekaan dan dunia internasional. Karena elit empat Partai Politik Timor-Timur saat itu (UDT, APODETI, KOTA dan Trabalista) belum membuktikan dalam suatu event, bahwa mereka betul-betul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memperoleh suara mayoritas rakyat Timor-Timur. Maka dari aspek legitimasi sosiologi, dapat dikatakan bahwa pengintegrasian wilayah Timor-Timur ke dalam NKRI, mengalami distorsi yang disengajakan guna memenuhi ambisi territorial penguasa Orde Baru masa itu.

b. Aspek Legal

Suatu tindakan dianggap legal, apabila dapat dilakukan sesuai dengan hukum (nasional dan internasional) yang berlaku. Teori hukum menyebutkan, ada tiga dasar atau landasan dalam rangka pembuatan segala peraturan pada tiap jenis dan tingkat, yaitu:

1. Landasan filosofis, yakni dasar filsafat atau pandangan, yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan kedalam suatu peraturan negara. Misalnya di Indonesia Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan.
2. Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 45 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan III organik. Dikaitkan dengan kasus Timor-Timur, invasi TNI pada 7, Desember 1975 kedalam wilayah NKRI, merupakan pengingkaran serius terhadap preambule UUD'45 yang menyatakan “ Kemerdekaan adalah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu maka Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan “

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Landasan politis, garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan Pemerintahan negara. Salah satu kebijaksanaan politik yang secara “eksplicit” dijadikan alasan atau pembenaran bagi invasi TNI ke Timor-Timur pada 7 Desember 1975 adalah RDTL (FRETILIN) berideologi komunis. Sebuah stigma politik yang didorong oleh suasana perang dingin antara blok barat dan timur.³

Dari paparan di atas, tergambarlah betapa timpangnya aspek sosial dan legal dalam penggabungan Timor-Timur kedalam NKRI.

Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan demokrasi, namun berhasil dibungkus rapih dan dibumbuhi dengan pemanis politik klasik Jakarta, yang salah satu di antaranya “ Saudaraku yang telah lama terpisah, kini kembali kepangkuan ibu Pertiwi “.

Padahal nenek moyang orang Timor-Timur tidak pernah mengenal apa itu ibu pertiwi dalam kosa kata dan perjalanan sejarah hidupnya. Maka wajar kekuasaan sejenis ini mendapat perlawanan, baik aktif maupun pasif dari masyarakat yang merasa martabatnya ditindas dan hak-haknya dirampas.

Perlu diingat, bahwa masalah Timor-Timur merupakan masalah yang menjadi agenda tetap PBB, karena sangat berbeda dengan masalah yang

³. Jurnal *GEVATIL*, *ibid.* hlm. 24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terjadi seperti Irian, Aceh, dan lain-lain. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus bertindak bijak dalam menyelesaikan kasus Timor-Timur.

Pemerintah B.J Habibie telah menjanjikan status khusus untuk Timor-Timur. Namun hal ini berarti Pemerintah Indonesia tetap hendak mempertahankan status Timor-Timur sebagai salah satu propinsi RI. Kita belum tahu secara pasti, apakah status khusus itu akan memuaskan semua pihak. Tetap saja sebagian besar masyarakat Timor-Timur yang menginginkan lepas dari RI, menjadikan Timor-Timur suatu negara merdeka dan berdaulat, khususnya kelompok FRETILIN yang konsisten dengan sikap itu. Ada juga yang nampaknya tetap menerima integrasi, walaupun dengan status khusus.

Bagaimanapun, keputusan B.J Habibie juga dapat diperkuat dengan tiga faktor atas peninjauan kembali status Timor-Timur. Ketiga faktor tersebut adalah, Pertama: dunia sudah berubah secara drastis dan fundamental sejak berakhirnya perang dingin, sepanjang menyangkut kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Tenggara setelah berakhirnya Cina-Soviet. Kedua, Timor-Timur telah menjadi masalah internasional, yang didukung oleh sikap PBB, yang tidak menerima integrasi Timor-Timur kedalam NKRI. Ketiga, Indonesia tengah memasuki suatu era baru, yaitu era reformasi. Sudah seharusnya semua kebijakan rezim Soeharto ditinjau kembali, termasuk kebijakannya terhadap Timor-Timur, yang mengalami kegagalan baik dari segi politik dalam negeri maupun dari segi hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional.⁴

⁴ Hortensio Pedro Vioera, *Kendala Integrasi Timor-Timur Ke dalam Masyarakat Indonesia*, Fisipol, SKRIPSI UGM, 2000. hlm. 37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam kaitannya dengan era reformasi, banyak aspek kehidupan yang telah berubah. Pemerintah baru telah sedikit membuka kran-kran kebebasan yang sebelumnya ditutup rapat. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan Pemerintah telah mendapat tempat, suatu hal yang sama sekali tidak ditemukan dalam masa kekuasaan rezim Soeharto.

Berbagai kelompok kepentingan mulai muncul dengan berdirinya puluhan partai baru yang mempunyai orientasi politik berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya, Partai Amanat Nasional (PAN), dalam manifesto politiknya menghendaki negara Indonesia dengan bentuk sistem negara federal. Partai ini juga menyinggung persoalan Timor-Timur. Ketua Umum PAN Dr. Amin Rais pernah diwawancarai dalam Harian Bernas, menyatakan bahwa penyelesaian masalah Timor-Timur harus melalui referendum. Dalam hal ini suatu perubahan politik yang luar biasa tentang persoalan Timor-Timur. Persoalan semacam ini, pada Pemerintahan Soeharto sangat sensitif dibicarakan oleh siapapun.

Lebih ekstrim lagi adalah partai baru lainnya yaitu Partai Uni Demokratik Indonesia (PUDI), yang diketuai Dr. Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang secara terang terangan tidak mengakui Timor-Timur sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari berbagai wawancara di beberapa media nasional maupun internasional (media cetak maupun media elektronik). Partai ini juga menghendaki penyelesaian persoalan Timor-Timur melalui referendum. Beberapa tokoh Nasional Indonesia lainnya juga melihat persoalan Timor-Timur agak lunak dan fleksibel. Abdurrahman Wahid “Gus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dur “ dari Nahdatul Ulama (NU) dan Megawati Suekarno Putri, ketua umum PDI Perjuangan pernah mengadakan pertemuan dengan Uskup Dili Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo SDB pada bulan juli 1998, dan kedua tokoh Nasional itu, sangat mendukung Uskup Belo dalam kebijakkannya terhadap Timor-Timur. Peristiwa yang meminta perhatian sangat besar di kalangan dunia pers dan politikus, baik nasional maupun internasional, telah menimbulkan fenomena politik saling mendukung. Salah satu tindakan politik cukup menonjol pada akhir pertemuan tersebut, telah dikeluarkan suatu statement politik bersama oleh Gus Dur, Mega dan Belo dengan beberapa butir keputusan tentang perbaikan kondisi politik Indonesia dan salah satu butir di dalamnya adalah penyelesaian persoalan Timor-Timur harus melalui jalan demokratis. Walaupun butir-butir politik itu tidak mewakili Pemerintah Indonesia, namun secara politis cukup kuat dan berpengaruh dalam proses penyelesaian persoalan Timor-Timur dalam era reformasi.

Sebelum pertemuan ketiga tokoh itu di kediaman Gus Dur, Uskup Belo terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Presiden Habibie bersama Menteri Luar Negeri Ali Alatas di Bina Graha. Seusai pertemuan itu ketika dalam jumpa pers, Uskup Belo sangat puas dan memuji Presiden Habibie dalam memandang persoalan Timor-Timur.⁵

Sejalan dengan langkah proaktif yang diambil oleh B.J Habibie dalam mencari penyelesaian berbagai masalah bangsa, juga proaktif dalam menyelesaikan masalah Timor-Timur. Jika sebelumnya Indonesia berada

⁵ Hortensio Pedro Viera, *ibid*, hlm.39

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam posisi defensif dalam upaya penyelesaian internasional tentang Timor-Timur, kini presiden B.J Habibie mengambil sikap proaktif dan inisiatif yang gencar melakukan pendekatan diplomatik ke berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah Timor-Timur khususnya, melakukan pendekatan terhadap Portugal dan PBB.

Pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden B.J Habibie mengumumkan bahwa masyarakat Timor-Timur akan diberi kesempatan untuk melakukan pemunggutan suara mengenai suatu paket otonomi. Paket status khusus dengan otonomi luas tersebut menurut Makmur Makka adalah bahwa Timor-Timur memperoleh status *Self Governing* dengan kewenangan luas diberbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya dengan catatan, pemerintah pusat menangani tiga kewenangan di antaranya; politik luar negeri, keamanan eksternal, serta moneter dan fiskal. Usulan penyelesaian ini dikenal dengan opsi pertama Presiden B.J Habibie.

Demi masa depan Timor-Timur, Presiden B.J Habibie mempertegas kebijakkannya dengan memberi dua opsi, otonomi luas atau melepasnya dari wilayah NKRI. Kebijakan ini diambil oleh Habibie dengan alasan bahwa dirinya tidak memiliki trauma soal Timor-Timur dan tidak ada beban sejarah, sehingga bisa melihat sejarahnya lebih jernih. Bagi Habibie, kasus Timor-Timur harus selesai sebelum millennium baru tahun 2000.⁶

Presiden B.J Habibie mengharapkan rakyat Timor-Timur sudah harus menentukan sikapnya sebelum pemilihan umum 7, Juni 1999 ini, apakah mau

⁶ Rapinus Rais, *Disintegrasi Timor-Timur*, 1999, *ibid* hlm.93

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berpisah secara terhormat dari Indonesia atau tetap bergabung dengan otonomi luas. Pernyataan Habibie ini muncul hari Jumat (12/2/99), setelah sehari sebelumnya (Kamis), ia menyatakan Pemerintah Indonesia lebih memilih Timor-Timur diberi kemerdekaan dan lepas dari Indonesia. Selain itu, Kamis Habibie juga menyatakan harapannya agar mulai 1 Januari 2000, Pemerintah tidak lagi diganggu masalah Timor-Timur. Habibie menyatakan tidak mau menyebut referendum untuk Timor-Timur, karena itu berarti Pemerintah Indonesia ikut campur menentukan cara memilihnya atau ikut bertanggungjawab. Habibie bersyukur apabila rakyat Timor-Timur menyatakan berpisah sekarang.

Sementara ketua Conselho Nacional Resistencia da Timorese (CNRT) atau Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor, Jose Alexandre Xanana Gusmao, menilai harapan Habibie bahwa sejak 1, Januari 2000 Pemerintah tidak lagi dibebani soal Timor-Timur, itu harus dilihat sebagai satu tantangan baru bagi rakyat Timor-Timur. Saya senang sekali mendengar ucapan Presiden B.J Habibie soal harapan itu. Dan memang sudah saatnya Timor-Timur merdeka,”...ucap Xanana Jumat, usai menerima kepala *interest section* Portugal untuk Indonesia Ana Gomes dicabang Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus, Jl. Percetakan Negara VII / 47, Jakarta Pusat. Ana Gomes kepada pers menyatakan pertemuannya dengan Xanana juga membahas soal pernyataan Habibie dan akan disiapkannya formulasi penyelesaian dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menlu Portugal yang akan melakukan pembicaraan segitiga dengan Menlu Ali Alatas di New York⁷

Sesuai penandatanganan Tripartit antara Portugal, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York pada 5 Mei 1999, menyepakati dan menetapkan tanggal 8 Agustus 1999, sebagai jadwal dilangsungkannya referendum di Timor-Timur. Momen di mana masyarakat Timor-Timur diberi kebebasan “*memilih one man one vote*” guna menentukan masa depan bangsa dan negaranya, yakni merdeka atau berintegrasi dengan NKRI. Selain itu mekanisme-mekanisme pemilihan yang disepakati oleh Pemerintah Portugal dan Indonesia, sehingga pesta demokrasi itu dilaksanakan secara luber dan jurdil. Mekanisme-mekanisme pemilihan yang disepakati yakni *article 1).* *Request the secretary-general to put the attached proposed constitutional framework providing for special autonomy for East Timor within the unitary Republic of Indonesia to the East Timorese people, both inside and outside east, for their consideration and acceptance or rejection through a popular consultation on the basis of a direct, secret and universal ballot. 2). Request the Secretary General to establish, immediately after the signing of this agreement, an appropriate united nation mission in East Timor to enable him to effectively carry out the popular consultation. 3). The Government of Indonesia will be responsible for maintaining peace and security in East Timor in order to ensure that the popular consultation is carried out in a fair and peaceful way in a atmosphere free of intimidation,*

⁷ *Kompas*, “Berpisah atau Otonomi Sebelum Pemilu”, 1999, hlm. 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

violation or interference from any side. 4). Request the Secretary –General to report the result of the popular consultation and to the Security Council and the General Assembly, as to inform the Government of Indonesia and Portugal and the East Timor people. (5)....(6)....(7)” (Teks kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Portugal yang disaksikan oleh Sekjen PBB).⁸

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penulisan ini. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana latar Belakang politik terjadinya referendum tahun 1999 di Timor- Timur ?
2. Mengapa proses pelaksanaan referendum tahun 1999, begitu cepat di Timor- Timur ?
3. Apa dampak referendum tahun 1999 terhadap Timor-Timur, dalam bidang ekonomi dan sosial budaya ?
4. Bagaimana sikap dan kebijakan PBB terhadap dampak Referendum tahun 1999 yang terjadi di Timor-Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana latar belakang politik terjadinya referendum tahun 1999 di Timor-Timur.

⁸ Jurnal *GEVATIL*, “*Referendum di Timor-Timur*,” 1999, hlm. 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Mengapa proses pelaksanaan referendum tahun 1999 dilaksanakan begitu cepat di Timor-Timur.
3. Dampak referendum tahun 1999 terhadap Timor-Timur dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
4. Bagaimana sikap dan kebijakan PBB terhadap dampak referendum tahun 1999 yang terjadi di Timor-Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat Penelitian yang akan disumbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan ini bermanfaat bagi Pendidikan Sejarah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai latar belakang terjadinya referendum tahun 1999 di Timor-Timur.
2. Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah yaitu untuk dapat memperkaya wawasan mengenai sikap dan kebijakan PBB terhadap dampak referendum tahun 1999 di Timor-Timur.
3. Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah yaitu untuk meluruskan fakta dari peristiwa yang selama ini terjadi di Timor-Timur.
4. Penulisan ini bermanfaat bagi generasi muda yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan sejarah pada khususnya dan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini yang berjudul “Referendum Tahun 1999 dan Dampaknya Terhadap Timor-Timur” merupakan studi kasus sejarah nasional yaitu sejarah sosial politik yang mengandung permasalahan-permasalahan yang sudah disinggung sebelumnya. Guna mengkaji referendum tahun 1999 dan dampaknya terhadap Timor-Timur” diperlukan suatu konsep pemahaman yang benar tentang konsep referendum itu sendiri. Konsep tersebut digunakan sebagai patokan kejelasan dan kepastian tentang sesuatu yang dibahas.

Secara etimologis istilah referendum berasal dari bahasa latin yang artinya *re*: kembali, *ferre*: menyerahkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan W.J.S. Poerwadarminta, mengartikan referendum sebagai” penyerahan” sesuatu masalah kepada orang banyak, supaya mereka menentukannya (jadi tidak diputuskan oleh rapat atau oleh Parlemen).

Ensiklopedi Indonesia, jilid 5, 1984, mengartikan referendum sebagai berikut: lembaga politik yang sering disebut plebisit, yakni permintaan untuk memperoleh keputusan dari orang banyak yang merupakan anggota masyarakat atau perhimpunan dan memiliki hak suara, untuk menolak atau memperkuat usul yang diajukan oleh pemerintah atau yang berwajib. Arti autentik, perumusan resmi dari referendum di Indonesia, adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD’ 45 (pasal 1 UU No.5 tahun 1985).⁹

⁹ Drs. Kansil. SH, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, 1986, hlm. 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jelas bahwa referendum berbeda dengan “Pemilihan Umum”. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila dalam negara Republik Indonesia). Dapat dikatakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat (demokrasi), karena dalam pembukaan UUD’45 ditegaskan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat. Oleh pasal 1 ayat (2) UUD’ 45 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian rakyatlah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menentukan cara bagaimana ia harus di perintah. Pelaksanaan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat yang dilakukan dengan kedaulatan rakyat itu, dan dilimpahkan kepada DPR yang menjadi inti dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁰

Referendum dan Pemilihan Umum jika dilihat dari sifatnya, keduanya memang memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan sifat antara Referendum dan Pemilihan Umum yakni:

* Sifat Referendum:

Langsung: Warganegara Republik Indonesia yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat, dapat menggunakan haknya secara langsung tanpa melalui pihak lain dan tanpa perantara maupun tingkatan.

¹⁰ *ibid*, hlm.193

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Umum: Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu diadakan referendum telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin berhak memberikan pendapat rakyat.

Bebas : Warganegara Republik Indonesia dijamin menggunakan hak memberi pendapat rakyat dijamin keamanannya untuk tidak mendapat tekanan, paksaan, gangguan, pengaruh dari siapapun dan dengan cara apapun.

Rahasia: Warganegara Republik Indonesia dijamin menggunakan haknya secara rahasia oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai isi pendapat rakyat yang diberikannya sesuai dengan hati nuraninya.

ABRI: anggota ABRI sebagai warga negara dalam Referendum mempunyai hak memberikan pendapat rakyat.

* Sifat Pemilihan Umum

Langsung : Rakyat pemilih (warganegara Republik Indonesia yang mempunyai hak memberikan suara dapat menggunakan haknya secara langsung menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

Umum: Warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yaitu 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.

Bebas: Warganegara Republik Indonesia yang berhak memilih, dalam menggunakan haknya, dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dengan siapa / dengan apapun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rahasia: Para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun, yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

ABRI: anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak pilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga permusyawaratan, atau perwakilan melalui pengangkatan.¹¹

Dengan kedua pengertian di atas, maka referendum apabila dilihat dalam arti strategis, bukan hanya merupakan alat untuk mencapai kemenangan atau kekalahan, tetapi berarti juga sebagai alat untuk mengawali suatu langkah baru perjuangan hidup di dalam kehidupan suatu kelompok organisasi untuk ikut membangun dunia ini. Referendum yang dilakukan di Timor-Timur adalah titik awal untuk mempersatukan visi dan misi politik dalam rangka membangun masyarakat Timor-Timur, dengan segala keunikan dan perbedaan yang dapat diperuntukkan bagi masyarakat Timor-Timur agar tetap berjuang menciptakan Timor-Timur yang baru.¹²

Penelitian ini mengkaji tentang referendum tahun 1999 dan dampaknya terhadap Timor-Timur, sebuah tinjauan historis-politis. Dalam membahas topik di atas, digunakan buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar. Sumber yang digunakan dalam membahas topik di atas, ialah ada dua macam yaitu; sumber primer dan sumber sekunder.

¹¹ *ibid*, hlm. 207

¹² Jurnal *GEVATIL*, *ibid*, hlm. 16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Beberapa sumber primer antara lain, pertama. Jurnal GEVATIL, yang berjudul *otonomi (Bagian dari RI) atau merdeka (menjadi negara berdaulat)*, 1999, diterbitkan oleh Grupo de Estudo Para a Valorização de Timor Leste (GEVATIL). Isinya tentang referendum Timor-Timur sebagai parameter demokrasi atau biang demokrasi. Digunakan untuk membahas permasalahan pertama. Kedua, *Majalah Tempo*, berjudul: Merdeka Timor Lorosa'e, 12/9/1999. Isi dari majalah ini adalah, mengenai masalah Republik Timor Lorosa'e dalam menghadapi masalah klasik negara baru. Digunakan untuk menjawab permasalahan keempat.

Ketiga, *Majalah Demokrat*, berjudul: Habibie Pembantai, Edisi 13, 1999. Isinya tentang Dhahara al-fasad Habibie. Digunakan untuk membahas masalah kedua.

Keempat, *Majalah Demokrat* berjudul, Ibu Mega tolonglah kami. Digunakan untuk membahas masalah keempat.

Kelima, *Majalah Talitakum* berjudul, Rame-Rame Klaim Aset, 2002. Isinya: Persoalan Timor Leste terhadap Aset yang ditinggalkan oleh Portugal dan Indonesia. Digunakan untuk membahas permasalahan kelima.

Beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pertama, buku yang berjudul, *Perang Tersembunyi*, oleh John G. Taylor,. Terbitan Forum Solidaritas untuk rakyat Timor-Timur (FORTILOS), tahun 1998. Isinya adalah sejarah Timor-Timur yang dilupakan. Buku ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan referendum tahun 1999 Timor-Timur yang ada dalam permasalahan kedua.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kedua, Helen Mary Hill, dalam bukunya tahun 2000, berjudul: *Gerakan Pembebasan Nasional Rakyat Timor Loro Sa'e*, terbitan Yayasan Hak dan Sahe Institute For Liberation Dili. Isi buku ini pada dasarnya berbicara mengenai Terputusnya usaha pembebasan nasional rakyat Maubere, menuju masyarakat yang bebas dari segala bentuk kebodohan, penindasan dan penghisapan manusia oleh manusia, yang disebabkan oleh pendudukan Indonesia. Digunakan untuk membahas permasalahan kedua.

Ketiga, Rapinus Rais, dalam skripsinya, tahun 2002, berjudul: *Disintegrasi Timor-Timur 1999*. Isi Skripsi ini pada dasarnya berbicara tentang dampak referendum 1999 di Timor-Timur. Digunakan untuk membahas permasalahan keempat Majalah *Keadilan untuk Timor Loro Sa'e*. Isi dari majalah tersebut berbicara mengenai upaya-upaya untuk mencapai pertanggung jawaban bagi kejahatan yang terjadi di Timor-Timur tahun 1999. Digunakan untuk membahas permasalahan kelima.

F. DUGAAN SEMENTARA

Ada beberapa politikus beranggapan bahwa kehidupan bernegara hanyalah milik para politikus, ada pula para intelektual yang beranggapan bahwa merekalah yang harus memberi pendapatnya dalam segala hal. Sementara masyarakat merasa martabatnya ditindas dan hak-haknya dirampas. Maka lama kelamaan kesadaran masyarakat terhadap anggapan tersebut mulai muncul suatu pemahaman bahwa segala kepemimpinan adalah sebuah proses.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Proses yang dimaksud adalah proses peninjauan, proses debat, proses keterlibatan serta sebuah proses jawaban terhadap keinginan rakyat.

Ada pendapat yang muncul agar tanggal pelaksanaan jajak pendapat diundur, karena alasan UNAMET mengalami keterlambatan logistik. Akan tetapi karena kondisi kebebasan dan keamanan saat itu sudah tidak memungkinkan, dan jikalau semakin lama ditunda, maka hal ini akan memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk menentang pelaksanaan jajak pendapat semakin lama.

Selain hal di atas, kegelisahan masyarakat pasca jajak pendapat muncul lantaran proyeksi dan skema tentang suatu Timor Lorosa'e baru sedang menjadi mimpi indah, tetapi sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena produksi ekonomi masyarakat dan produksi dari luar, saling mengesampingkan, sehingga bisa menurunkan produktivitas negara.

Hancurnya kehidupan sosial budaya pada pasca jajak pendapat tidak memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas tradisi sosial budaya sebagaimana layaknya. Dengan peristiwa di atas, maka sikap PBB sebagai lembaga internasional, sangat simpati dan menaruh perhatian dengan kondisi Timor-Timur pasca referendum. Wujud perhatian tersebut dilakukan melalui Bank Dunia (world Bank), yaitu suatu cara untuk memerangi kemiskinan, serta mendorong setiap orang untuk dapat membantu dirinya dan lingkungannya dengan cara dapat memberi pinjaman, menyediakan sumber daya, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, serta membentuk kemitraan disektor swasta dan publik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Metode Penelitian Dan Pendekatan.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menyangkut tentang obyek dokumentasi sejarah, oleh karena itu metode deskriptif analisis yang tepat untuk digunakan. Metode deskriptif itu sendiri diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatian kepada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya. Menurut Louis Gottschalk, ada empat tahap yang harus dijalani untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan. Keempat tahap tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk memahami buku-buku, dokumen-dokumen, Koran-koran dan majalah-majalah yang ada kaitan dengan penelitian ini.¹³

a. Pengumpulan sumber.

Pengumpulan sumber adalah pengambilan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa majalah-majalah yang diterbitkan GFVATII, Talitakum, Yayasan Hak, *Sahe Institute for Liberation*, Kliping, koran-koran serta surat kabar tentang Timor-Timur yang dianggap sebagai sumber utama. Sedangkan sumber sekunder adalah biasanya berupa buku-buku.

¹³ Rapinus Rais, *Disintegrasi Timor-Timur*, 1999, *ibid* hlm. 13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Kritik Sumber

Segala sumber, baik primer maupun sekunder dikumpulkan setelah itu, dilakukan kritik terhadap sumber yang telah diambil. Dalam mengkritik sumber, dilakukan terhadap kritik ekstern. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap bentuk luar dari dokumen sejarah. Kritik ini bertujuan untuk mengetahui asli atau tidaknya suatu dokumen sejarah. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap isi daripada sumber sejarah, yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari isi dokumen tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah tafsiran terhadap sumber-sumber yang digunakan, kemudian dapat dilakukan suatu uraian yang disertai dengan analisa-analisa.

d. Pendekatan

Titik berat pendekatan penelitian ini adalah pendekatan historis, politis dan sosiologis. (Rapinus Rais, *ibid*, hal. 15). Ditinjau dari sumber penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*liberary search*). Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data-data dari literatur-literatur yang ada di Timor lorosa'e (Yayasan Hak, Talitakum, *Sahe Institute for Liberation, CAVR*), dan di Perpustakaan SADHAR. Literatur tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga berupa bahan dokumen, Majalah, Koran, dan bahan tertulis lainnya. Manfaat penelitian melalui penelusuran Perpustakaan dan penelaan kepustakaan adalah dapat mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis dan efisien.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pendekatan

Untuk menganalisa lebih lanjut diperlukan berbagai pendekatan ilmu-ilmu dan kosep-konsep ilmu sosial lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah dua atau lebih disiplin ilmu yang saling bergandengan berdasarkan interaksional masing-masing. Titik berat penelitian ini menggunakan pendekatan historis, politis dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui latar belakang terjadinya referendum 1999 di Timor-Timur. Sejarah pada dasarnya tidak bisa lepas dari masa lampau manusia itu sendiri. Demikian juga referendum yang terjadi di Timor-Timur 1999 pun, tidak lepas dari perjalanan sejarahnya.

Memasuki tahun 1999 sesungguhnya persoalan Timor-Timur yang sulit diselesaikan selama hampir 24 tahun, di mana Indonesia mengklaim Timor-Timur sebagai propinsi ke 27 dari NKRI dengan berbagai tindak kekerasan, kini upaya yang perlu dilakukan agar tragedi kemanusiaan di Timor-Timur tidak harus berkepanjangan, dan Bangsa Indonesia tidak harus melakukan pengingkaran pada diri sendiri. Bangsa Indonesia lahir dari kandungan pergerakan anti kolonialisme / imperialisme, ketika membentuk negara merdeka dalam konstitusinya menatakan kata-kata luhur...” Kemerdekaan itu adalah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan".¹⁴

Akhir-akhir ini, telah memasuki babak baru tentang persoalan Timor-Timur dalam kancah diplomatik internasional Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia melanjutkan proses perundingan di bawah pengawasan PBB, dan mencapai butir kesepakatan mengenai status politik wilayah tersebut. Walaupun belum berhasil mencapai langkah-langkah kongkret, pihak PBB menilai perundingan yang terus berlanjut dan memasuki wilayah pembicaraan yang semula dianggap sensitif sebagai sebuah kemajuan. Sementara itu, dunia internasional juga menunjukkan peran lebih aktif dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan upaya penyelesaian secara damai dan memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Timor-Timur.

Sebagai tanggapan terhadap perkembangan damai internasional dan sejumlah perubahan di dalam negeri, Pemerintah Indonesia mengambil langkah seperti pengurangan pasukan ABRI, sebanyak 400 orang (Kopasus) dari sekitar 21.000 personel yang tercatat (Laporan Yayasan Hak Dili). Pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintah mengeluarkan pernyataan penting, mengenai adanya kemungkinan opsi kedua yaitu melepas Timor-Timur dari wilayah Republik Indonesia. Walaupun

¹⁴ John G. Taylor, *Perang Tersembunyi, Sejarah Timor-Timur yang Dilupakan. Forum Solidaritas Untuk Rakyat Timor-Timur (FORTILOS)*, 1998. hlm.xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perkembangan positif ini kemudian harus dinodai dengan berbagai insiden, hal ini merupakan fakta yang harus terjadi.¹⁵

Merdeka adalah suatu pengertian yang lebih bisa dihayati dengan benar oleh yang memerlukannya. Pada mulanya pikiran kemerdekaan dibangkitkan dari pengalaman perbudakan dan dalam bentuknya yang mutakhir, penjajahan. Yang berbelenggu lah yang paling tahu apa maknanya lepas dan bebas.¹⁶

Sejarah bangsa-bangsa jaman modern bergerak di sekitar usaha untuk memperoleh kebebasan. Revolusi besar di Eropa dan Amerika setidaknya telah cukup banyak memberi inspirasi kepada negara-negara tertinggal di belahan timur dunia, agar terus berjuang demi suatu harapan akan kebebasan. Bebas dari belenggu kapitalisme ekonomi Barat, bebas dari retorika dan represi politik penguasa dalam negerinya, atau bebas dari ketajutan konservatisme masyarakat setempat yang makin anarkis memuntahkan kekalutannya. Karena itu pergolakan mudah terjadi dimana-mana atas nama pembebasan, seperti di negeri ini. Di sini perjuangan masyarakat Timor-Timur menghendaki kebebasan, keadilan, melawan kesewenangan Pemerintah Pusat menuntut referendum, namun justru dilawan dengan penindasan, represi aparat militer, karena Pemerintah masih ingin mempertahankan hak-hak istimewanya.¹⁷



¹⁵ Hortensio Pedro Viera, *ibid.* hlm.115

¹⁶ *Tempo*, "Merdeka Timor Lorosa'e", 1999. hlm.2

¹⁷ *Jurnal PASTI*, "Suara Revolusi dan Demokrasi," 1999. hlm. 2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Sistem Penulisan

Tulisan ini terdiri dari beberapa bab, yang akan menjelaskan permasalahan-permasalahan penulisan sebagai berikut:

Bab. I Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian dan pendekatan, serta tinjauan sumber.

Bab. II Berisi penjelasan mengenai latar belakang terjadinya referendum 1999 di Timor-Timur. Dalam bab ini akan disoroti sudut pandang tentang masalah Timor-Timur, baik dunia internasional, Pemerintah RI, maupun masyarakat Timor-Timur.

Bab. III Menjelaskan tentang proses pelaksanaan referendum tahun 1999 di Timor-Timur.

Bab. IV Menjelaskan tentang dampak referendum tahun 1999 terhadap Timor-Timur. Dalam bab ini, akan disoroti masalah sosial politik dan sosial ekonomi.

Bab.V menjelaskan tentang sikap dan kebijakan PRB terhadap dampak referendum 1999 di Timor-Timur, baik terhadap masyarakat Timor-Timur maupun kaum pendatang.

Bab.VI berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahulu.

BAB II

LATAR BELAKANG POLITIK TERJADINYA REFERENDUM TAHUN 1999 DI TIMOR TIMUR

A. Timor-Timur Di Mata Dunia Internasional.

Salah satu kekurangan pencaplokan Timor-Timur ke dalam NKRI yang dapat dilakukan dengan TAP MPR/ VI/1978 oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu, adalah kesalahan yang sangat fatal, karena belum mendapat pengakuan dunia internasional. Walaupun pencaplokan tersebut dapat diperjuangkan mati-matian oleh Pemerintah Indonesia di forum Internasional, tetap saja mengalami hambatan. Mayoritas forum DK PBB sepakat bahwa kasus Timor-Timur harus diselesaikan dengan memberi referendum kepada rakyat Timor-Timur, untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang sebenarnya. Hal ini belum juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.¹⁸

Sejak 24 tahun, sejak tahun 1975, Pemerintah Indonesia berusaha menyembunyikan manuver internasionalnya dari publik Indonesia. Dan selama itu pula politik Luar Negeri Indonesia diarahkan untuk mencari keabsahan tindakan pendudukan atas Timor-Timur. Namun argumen diplomatiknya, ternyata tidak pernah mampu menyanggah tuduhan bahwa Indonesia sudah melanggar dua prinsip dasar menurut Piagam PBB, yaitu prinsip *menentukan nasib sendiri* bagi rakyat Timor-Timur, dan prinsip *penggunaan kekuatan bersenjata atau agresi* ke wilayah tersebut.

¹⁸ Rapinus Rais, *Disintegrasi Timor-Timur*, 1999 hlm..79

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk mengabsahkan bahwa Indonesia sudah menjalankan prinsip *menentukan nasib sendiri*, maka Indonesia mengajukan tiga argumen, yaitu *pertama*; bahwa integrasi merupakan permintaan dari rakyat Timor-Timur sendiri, dengan fakta dilakukannya penandatanganan deklarasi integrasi oleh empat Partai politik di Balibo. Keluarnya resolusi integrasi dari hasil sidang DPR Timor-Timur Mei 1976. *Kedua*; bahwa tanpa ada persetujuan dari masyarakatnya, Timor-Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia karena ada ikatan historis, etnis dan kultural antar Timor-Timur dan Indonesia. *Ketiga*; bahwa sumber daya ekonomi Timor-Timur tidak memungkinkannya menjalankan hidupnya sebagai negara merdeka, dan membutuhkan bantuan negara dengan ekonomi lebih stabil.

Argumen-argumen ini gagal menangkis tuduhan terhadapnya. Alasan pertama Indonesia tidak memenuhi prinsip IX Resolusi MU 1541 (XV) mengenai syarat pelaksanaan kehendak rakyat yang sah dan murni. Sekalipun mengacu pada *opini* yang pernah dikeluarkan Mahkamah Internasional atas kasus Sahara Barat, dan ayat 6 Resolusi Majelis Umum 1541 (XV), alasan historis, etnis dan kultural tidak cukup kuat untuk didukung oleh dua prinsip di atas. Alasan ketiga Indonesia secara tepat dibantah oleh Resolusi 1541 (XV) yang menegaskan dalam ayat tiga bahwa “kurangnya kemampuan ekonomi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kemerdekaan suatu wilayah yang tak berpemerintah sendiri” (*non self Government territory*).

Dekolonisasi Timor-Timur memang tidak selama dekolonisasi Eritrea atau Sahara Barat, yang lebih dari 30 tahun bergelut dengan masalah dekolonisasi, atau

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahkan Irlandia Utara yang sejak 200 tahun lalu hingga saat ini, masih memperjuangkan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Namun melihat Quene Bissau, Cape Verde, Angola dan Mosambique, merupakan daerah-daerah koloni Portugis yang berhasil memperoleh kemerdekaan di akhir tahun 60-an dari Portugis, maka Timor-Timur justru ditinggalkan sendiri menghadapi ancaman agresi, dan terkatung nasibnya selama 24 tahun. Sementara usaha Indonesia memberi pembenaran aneksasi dengan dasar bahwa, Timor-Timur menyatakan keinginannya “di integrasikan kembali,” karena ada ikatan sejarah, etnik, budaya dan bahwa Timor-Timur tidak mempunyai sumber ekonomi yang kuat, secara factual maupun legal tidak dapat dibenarkan.¹⁹

Kebekuan dan kebuntutan bagi penyelesaian masalah Timor-Timur selama 23 tahun, akhirnya mencair dan memperoleh terobosan. Terlepas dari sikap pro dan kontra yang muncul dari berbagai kalangan, dengan aneka ragam kepentingan dan orientasi politik, patut bagi semua untuk merasa legah bahwa jalan keluar untuk menyelesaikan suatu konflik yang berkepanjangan mulai nampak. Meskipun masih disertai opsi-opsi, setidaknya pernyataan Pemerintah Indonesia akhir bulan Januari, tahun mengakhiri suatu fase ketidakpastian, yang dialami semua pihak yang terkait dalam masalah Timor-Timur, terutama rakyat Timor-Timur sendiri. Dalam percaturan politik, adalah wajar bila sebuah kebijakan politik selalu mendapat reaksi, baik yang pro maupun yang kontra.²⁰

Sejak dimulainya perang kemerdekaan nasional Timor-Timur, yang teratur dan terorganisir di bawah partai Fretilin pada tahun 1974, tidak atau belum ada

¹⁹ Majalah *Talitakum*, “*Tolak Otonomi*” Edisi 5 Dili 1999, hlm .50

²⁰ Majalah *Talitakum*, “*Merdeka Siapa Takut*,” Edisi 3 Dili 1999, hlm. 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

suatu kesepakatan Internasional antara Portugal dan Indonesia di bawah naungan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kepastian tanggal, kriteria dan mekanisme bahwa akan diadakannya suatu referendum buat rakyat Timor-Timur, yang terkotak-kotak oleh berbagai opsi politik, yang ditawarkan oleh partai-partai untuk menentukan masa depannya sendiri. Baru pertama kali muncul secara jelas dan secara yuridis pada tanggal 5 Mei 1999, ketika wadah Triparti (Indonesia, Portugal dan Sekjen PBB), menandatangani suatu kesepakatan bersama untuk mengadakan pemungutan suara tentang otonomi khusus Indonesia buat orang Timor-Timur. Oleh karena itu, orang Timor-Timur akan dihadapkan pada dua kemungkinan politik, yakni menolak atau menerima tawaran Indonesia itu, yang telah direvisi oleh Sekjen PBB dan Pemerintah Portugal.²¹

Selama ini memang Indonesia begitu konsisten dengan argumen bahwa Timor-Timur adalah bagian integral dari Indonesia, sekarang telah berubah sikap. Kalau kita amati, bahwa Pemerintahan yang lalu itu sangat otoriter, yang hanya memaksakan kehendaknya. Setelah adanya perubahan, rezim ini masuk dalam era pembangunan dan era reformasi, sehingga Indonesia ingin menjadi suatu negara yang demokratis. Tapi dalam masalah Timor-Timur, hal ini bertentangan dengan konsepnya, sehingga perlakuan rezim lama terhadap Timor-Timur itu ingin diubah oleh Pemerintah sekarang.

Selain itu, menurut spekulasi Indonesia sedang masuk dalam suatu krisis ekonomi yang berakibat pada krisis politik. Hal ini dapat merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara yang rata-rata 7% per tahun, menjadi di bawah nol. Maka

²¹ Jurnal *GEVATIL*, "Referendum," Edisi 1 Dili 1999, hlm. 8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebagai suatu Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap 200 juta penduduknya, tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tapi harus berusaha agar bisa mendapat pinjaman dari luar negeri. Sebab kalau kita lihat, negara lain akan memberi pinjaman tapi dengan syarat, yaitu melihat pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negeri ini, termasuk Timor-Timur. Tentu hal ini akan menghambat pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, maka pinjaman Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan jalan keluarnya, yaitu dengan mengorbankan Timor-Timur yang selama ini menjadi rintangan dalam krisis di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa kemerdekaan Timor-Timur bukan merupakan hadiah dari Pemerintah Indonesia, tetapi ini demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita lihat dari segi Timor-Timur, tentu Indonesia sangat rugi, tapi memang itulah keadaannya. Indonesia menyatakan tidak akan seperti Portugal yang meninggalkan Timor-Timur begitu saja, tapi Indonesia akan mempersiapkan keadaan yang baik dan akan melibatkan Portugal dalam penyelesaian masalah Timor-Timur, dalam perundingan antara Menlu kedua negara, yaitu Indonesia dan Portugal.²²

Dukungan negara-negara Barat terhadap penyelesaian masalah Timor-Timur, yang dilakukan melalui referendum. Berikut ini, akan terlihat jelas sikap dan dukungan negara-negara tersebut:

²² Majalah *Talitakum*, "Merdeka Siapa Takut," Edisi 3 Dili 1999, hlm .24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Amerika Serikat.

Amerika Serikat yang sering mengklaim dirinya sebagai polisi dunia dan penegak keadilan dan demokrasi, memang mempunyai peranan penting di Timor-Timur. Invasi 7 Desember 1975 yang dilakukan oleh Indonesia, juga atas restu Pemerintahan Amerika Serikat, yang merasa diri terancam bahwa Timor-Timur yang merdeka akan menjadi 'Kuba di Asia.' Selama bertahun-tahun politik luar negerinya dituntun oleh nafsu perang dingin, dan selama bertahun-tahun pula Amerika Serikat mendukung Pendudukan Indonesia, baik dengan cara menjual senjata, memberi pelatihan militer, bantuan ekonomi maupun dukungan politik terhadap Rezim Soeharto.²³

Dalam hal ini negara terkuat seperti Amerika Serikat, sedang terkenang pada komunisme yang didukung oleh Blok Timur. Maka dengan label, "Hak Asasi Manusia," sehingga Amerika Serikat mendukung segala gerakan yang anti komunisme. Begitu juga dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia untuk mencaplokkan Timor-Timur kedalam NKRI. Semua ini merupakan bagian dari kebijaksanaan politik Amerika Serikat khususnya, untuk melindungi supremasi dan kepentingannya di Asia Tenggara. Dengan kondisi seperti ini, sangat mudah Timor-Timur dipermainkan sebagai masalah domestik, di mana masalah Timor-Timur dialokasikan sebagai masalah dalam negeri, dan tidak di internasionalkan.

²³ John G. Taylor, *Perang Tersembunyi, Sejarah Timor-Timur yang diLupakan, Dili (FORTILOS)* 1998, hlm viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ditinjau dari perkembangan politik internasional dalam kurung waktu sampai dengan tahun 1984, suara-suara internasional bisa dikatakan menurun dalam kencamannya terhadap Pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh karena aktifnya lobi-lobi internasional Indonesia, serta gencarnya kemajuan pembangunan di Timor-Timur. Namun kemajuan diplomatik yang telah dimiliki oleh Indonesia, telah dinodai dengan tragedi Santa Cruz Dili 12 November tahun 1999. Saat itu kongres Amerika Serikat mengajukan resolusi pada tanggal 21 November 1991, yang menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat harus memberi dukungan, untuk segera melanjutkan resolusi dalam Sidang Umum, dan meminta Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia segera membentuk pengamat khusus di Timor-Timur untuk membantu penyelesaian konflik di wilayah itu.

Opini internasional mulai mengubah sikap terhadap Indonesia dalam kasus Timor-Timur. Hal ini juga disebabkan oleh karena konstelasi politik internasional sudah mengalami perubahan. Politik bermuka dua yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, pada mulanya mendukung invasi Indonesia atas Timor-Timur, berbalik arah 180°, dan cenderung dengan kuat mendukung kemerdekaan Timor-Timur.²⁴

Senat Amerika Serikat dalam pemungutan suara dengan hasil 98-0 (2 Juli 1999), mengeluarkan suatu Amendemen yang mendesak Pemerintahan Clinton bersikap lebih tegas mendukung jajak pendapat di

²⁴ Hortensio Pedro Viera, *Kendala Integrasi Timor-Timur ke Dalam Masyarakat Indonesia*, Fisiopol UGM Yogyakarta, 2000, hlm 92 dan 95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Timor-Timur agar dapat dilakukan secara bebas , fair dan demokratis. Dalam pada itu, Amandemen Senat Amerika tersebut, juga mendesak agar Menteri keuangan dan pejabat Amerika Serikat yang menjadi direktur eksekutif dalam lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan, dan melihat dengan seksama upaya Pemerintah Indonesia dalam menjamin jajak pendapat yang damai, jika memberikan suaranya terhadap segala bantuan untuk Indonesia.

Senator Patrick Leahy yang mensponsori amandemen itu seperti dikutip AFP “kita harus menggunakan segala upaya untuk dapat menyakinkan Pemerintah Indonesia, agar bisa menghentikan kekerasan di Timor-Timur. Lebih lanjut, “ini bukan hanya tanggungjawab mereka (Indonesia), tetapi juga kepentingan mereka.” Kalau jajak pendapa gagal, maka Indonesia akan dikutuk dunia internasional, katanya lagi. Dalam amandemen itu disebutkan bahwa Pemerintah Clinton harus meningkatkan upayanya untuk mendesak Pemerintah Indonesia, agar segera mungkin melucuti senjata para milisi, melepaskan semua tahanan politik, dan mengizinkan orang Timor-Timur yang ada di luar negeri, untuk kembali ke Timor-Timur dan berkampanye di sana.²⁵

2. Australia.

Perintah Australia yang khawatir terhadap ancaman serbuan jepang, kemudian menerjunkan tentaranya, untuk bertempur melawan

²⁵ Majalah *Talitakum*, “*Tolak Otonomi*”. Edisi 5 Dili 1999, hlm. 42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jepang, dan mengganggu persiapan penyerbuan Jepang ke Australia. Namun menghadapi tentara Jepang yang lebih kuat, banyak tentara Australia yang tewas dalam pertempuran. Sementara yang lain dapat dibantu oleh orang Timor-Timur bergerilya di hutan. Bagaimana pengorbanan penduduk Timor-Timur yang disebut *Creados* (pembantu) menolong tentara Australia yang dikejar dan dicari tentara Jepang. Namun apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, ketika rakyat Timor-Timur diperlakukan dengan hal yang sama pada 30 tahun kemudian? Di bawah Pemerintah PM Gough Whitlam, Australia menjadi salah satu negara yang mengakui Timor-Timur menjadi bagian teritori Indonesia. Bukan hanya itu, pada tahun 1989, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia atau Soeharto menandatangani perjanjian eksploitasi bersama "Celah Timor" (Timor Gap). Walaupun Australia dikatakan sebagai negara yang mendukung pencaplokan Timor-Timur ke dalam wilayah NKRI, diakui negara tersebut tidak bisa melepaskan diri dari kencanaan atau tekanan dari dalam masyarakat, yaitu pada segi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Timor-Timur.²⁶

Dengan kondisi politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin berkembang, akhirnya pandangan di atas berseberangan dengan pandangan pengusaha-pengusaha di Australia. Mereka ini adalah para buruh Australia yang berkeinginan agar Australia membantu perjuangan kemerdekaan Timor-Timur, karena negaranya pernah berhutang budi

²⁶ *Kompas*, "Australia Pendukung Integrasi Timor-Timur," Jakarta 1999, hlm. 28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat tercermin dalam reaksi pers, Serikat Buruh dan masyarakat Australia terhadap integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah NKRI. Pers Australia selalu melancarkan kritik dan berita, yang justru menekan dan merepotkan posisi Pemerintah Indonesia di Dunia Internasional.²⁷

Menjelang Jajak pendapat yang dikeluarkan oleh Presiden B.J Habibie, Australia termasuk misi PBB dan justru jadi sponsor yang diterjunkan ke Timor-Timur dengan memimpin pasukan Multinasional, yang dikomandai langsung oleh Jendral Peiter Cogrove dari Australia, guna menjaga perdamaian dan keamanan pada saat jajak pendapat berlangsung. Hal ini merupakan suatu ungkapan, Australia ikut mendukung kemerdekaan bagi wilayah Timor-Timur.²⁸

3. Portugal.

Timor-Timur yang merupakan jajahan Portugal selama 450 tahun, telah mengakui kemerdekaan Timor-Timur sejak dilaksanakannya *Crimeira* (Konfrensi Tingkat Tinggi) di Macau pada tanggal 26-28 juni 1975.²⁹ Portugal bersikap tegas mengutuk Indonesia, karena telah merebut Timor-Timur sambil mengklaim diri sebagai penguasa administratif daerah itu. Portugal dengan berbagai upaya mempengaruhi anggota sidang DK PBB, agar anggota sidang tersebut mengeluarkan sebuah statemen untuk mengutuk Indonesia.

²⁷ Rapinus Raís, hlm 30

²⁸ Majalah *Gatra*, "Panasnya Bumi Lorosa'e," Dili 1998, hlm .5

²⁹ Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Timor Lorosa'e*. Dili 2002, *ibid* hlm. 164

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Portugal secara aktif ikut membantu merumuskan resolusi-resolusi yang dapat mengancam Indonesia di DK PBB. Reaksi awal Portugal dalam menyambut perubahan sikap Pemerintah Indonesia tentang paket otonomi yang diperluas, sangat dingin dan belum memberi jawaban tentang perundingan Tripartit antara Indonesia dan Portugal di bawah naungan PBB. Menurut Portugal, formulasi referendum adalah pilihan yang paling demokratis, dan independen bagi rakyat Timor-Timur. Selama ini referendum yang jujur dan adil di bawah pengawasan PBB, belum pernah dilakukan di Timor-Timur. Jika Indonesia selalu menolak referendum, berarti Indonesia memang meragukan integrasi dan legitimasi integrasi dalam kondisi rakyat Timor-Timur saat ini, yang sudah berani bersikap dan berpikir kritis.³⁰

4. Vatikan.

Bagi Vatikan kasus Timor-Timur merupakan persoalan tersendiri, karena secara *de jure* integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI, belum mendapat pengakuan dari PBB.³¹ Takta Suci Vatikan yang jarang memberi komentar tentang perkembangan di Timor-Timur, mengutuk serangan terhadap kompleks ibadah, pembunuhan terhadap para pastor, suster dan rakyat Timor-Timur secara keseluruhan.³² Pada bulan Oktober 1989, kunjungan Paus dari Vatikan di Timor-Timur, disambut dengan meriah oleh masyarakat Timor-Timur. Paus sempat melihat adanya aksi demonstrasi damai oleh pemuda Timor-Timur untuk menuntut referendum di Timor-Timur. Bagi Vatikan

³⁰ Roy Pakpahan, *Mengenal Timor-Timur Dulu dan Sekarang*, Jakarta 1998, hlm .56

³¹ Rapius Rais, hlm .82

³² Majalah *CAVR*, "Timor Lorosa'e Sebuah Tragedi Kemamusiaan,," Dili 1999, hlm .4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sampai sekarang belum mengakui integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah NKRI, sehingga keuskupan Dili langsung ditempatkan di bawah kewenangan Vatikan dan bukan di bawah Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Menurut Vatikan, selama PBB belum mengakui integrasi Timor-Timur, maka Vatikan juga tetap bersikap yang sama dengan PBB. Pandangan Vatikan yang paling keras terhadap Indonesia, terlontar ketika Paus Yohanes Paulus II mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan agama dan budaya di Timor-Timur, yang disinyalir ingin dihapus oleh Indonesia.³³

Ketua Komisi *Justice and peace* kepausan, Roger Kardinal Etchegaray ketika berkunjung ke Dili february 1996, merupakan perhatian keprihatinan dan solidaritas Bapak Suci (Paus Yohanes Paulus II), Curia Vatikan terhadap gereja di keuskupan Dili, begitu pula pada masyarakat Timor-Timur pada umumnya, tentang perkembangan situasi di Timor-Timur. Dalam misa suci di Katedral, Bapak Kardinal menyampaikan kepada umat bahwa, tiap hari Bapak Suci berdoa dan mengharapkan supaya identitas kultural dan historis, dapat di hormati di wilayah tersebut.

Seperti yang dikutip Uskup Dili Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB dalam *Gaudium Et Spes...* "Gereja menyambut baik dambaan-dambaan mendalam dari rakyatnya, menunjukan harapan terakhirnya, mengkhotbakan kemerdekaan, martabat hati nurani dan hak-hak yang adil dalam rencana ilahi demi keselamatannya". Uskup Belo menambahkan bahwa "manusia adalah makhluk untuk merdeka. Itu berarti realisasi dirinya barulah lengkap apabila ia

³³ Roy Pakpahan, *Mengenal Timor-Timur Dulu dan Sekarang*, Jakarta, hlm 43

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mampu membuat keputusan sendiri tentang pilihan-pilihannya, dan memikul tanggungjawabnya, demi tindakan-tindakannya. Tanpa intimidasi berbentuk apapun.....Bila makhluk manusia tidak dihargai dalam hak-haknya yang paling azasi, oleh mereka yang bertugas dan bertanggungjawab dalam masyarakat, maka kita akan mendapat penjajahan, perbudakan, arogansi, kesewenang-wenangan, kematian orang-perorangan dan kematian rakyat.....Martabat manusia herakar dan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Yesus telah mengembalikan harkat-martabat kepada orang selaku makhluk manusiawi. Demikianlah Ia mendekatkan kita satu per satu dari perbudakan moral dan sosial.³⁴

Oleh karena itu Vatikan ikut mendukung Timor Lorosa'e yang telah membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang real. Kekuasaan administratif Portugal, dan kekuasaan faktual Indonesia sudah berakhir di tahun 1999. Memasuki tahun 2000, rakyat Timor-Timur sudah berbicara sebagai sebuah negara bangsa. Boleh dikatakan bahwa Timor Lorosa'e adalah bangsa yang unik, dan lahir ditahun yang unik pula. Karena itu Jubelium ini, memiliki korelasi makna pembebasan dalam kitab Suci, sebagaimana pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan Babilonia.³⁵

³⁴ Frans Sihol Siagian dkk, *Voice Of The Voiceless (Suara Kaum Tak Bersuara)*, Jakarta, 1997 hlm 264

³⁵ Pe. Martinho Germano Da Silva Gusmao, *Bunga Rampai, Menyongsong Tahun Pembebasan*. Dili 2001, *ibid* hlm 133

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. PBB.

Sejak tahun 1983 pembicaraan Timor-Timur di Sidang Umum PBB, ditangguhkan sampai akhir tahun 1991. Bagi masyarakat Internasional termasuk PBB, masalah Timor-Timur belum dianggap selesai, walaupun Indonesia menyatakan bahwa Timor-Timur sebagai propinsi ke-27 dalam NKRI. Selain karena secara hukum internasional memang posisi Indonesia lemah, juga ada beberapa faktor yang lebih dulu muncul sebelum integrasi, yang menunjukkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat Timor-Timur. Pada bulan juni 1975, ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Fretilin, Jose Ramos Horta di Jakarta, Menlu Indonesia saat itu Adam Malik secara tegas menyatakan bahwa, Indonesia menghormati aspirasi kemerdekaan Timor-Timur. “Kemerdekaan setiap negara adalah hak setiap bangsa, tidak terkecuali bagi rakyat Timor-Timur” ujar Adam Malik.

Pernyataan itu diperkuat setelah sebelumnya pada tahun 1949, ketika Timor Barat (sekarang NTT), menjadi bagian Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan dari Belanda, Menteri Luar Negeri saat itu, Soebandrio mengatakan “Mengenai separoh Pulau Timor yang di bawah Portugis, Indonesia tidak mempunyai klaim teritorial sama sekali.” Dua fakta itu menunjukan ketidakkonsistenan sikap politik Indonesia, dan diperkuat fakta bahwa tidak semua rakyat Timor-Timur ingin integrasi. Apalagi menurut PBB, secara *de jure* Portugal adalah penguasa administratif wilayah Timor-Timur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karena Indonesia terus bertahan di Timor-Timur akhirnya 13 April 1976, keluarlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk Indonesia atas penyerbuan pasukannya ke Timor-Timur. Resolusi juga memutuskan agar Indonesia segera menarik mundur pasukannya dari Timor-Timur, dan memberi mandat kepada Sekjen PBB untuk mengadakan penyelidikan atas situasi di Timor-Timur. Namun resolusi ini pun tidak dipatuhi oleh Indonesia, dan pasukan Indonesia tetap berada di Timor-Timur. Tanggal 17 November 1976 PBB melakukan pemunggutan suara untuk merangsang resolusi yang isinya agar PBB menolak penggabungan Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia, dan menyeruhkan penarikan pasukan Indonesia dari Timor-Timur.

Pasca tragedy Santa Cruz, Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, mengeluarkan resolusi no 63/ 1997, yang isinya meminta Indonesia agar segera menghentikan terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur. Pelanggaran itu menyangkut soal adanya penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan politik diskriminasi.³⁶

Dengan situasi yang tidak memungkinkan terciptanya perdamaian dan keadilan, membuat hampir semua anggota PBB sepakat bahwa tindakan Pemerintah Indonesia tidak dapat dibiarkan, dan bahwa Dewan Keamanan serta Sekjen PBB harus segera mengambil tindakan. Dalam waktu singkat, Indonesia menjadi tertekan di mata dunia internasional, karena ulah Pemerintahannya sendiri. Dengan tindakan PBB tersebut, membuat lembaga-

³⁶ Roy Pakpahan, Jakarta 1998, hlm .37-38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lembaga internasional langsung hilang kepercayaan, karena keterlibatan TNI dan Polri dalam pembantaian massal terhadap rakyat Timor-Timur, baik pra referendum maupu pasca referendum. Banyak lembaga yang menarik dukungan, dan akan menghentikan bantuan bagi Indonesia.

Aksi boikot terhadap kegiatan ekonomi, mulai terjadi di banyak negara yang pada akhirnya akan merugikan rakyat banyak. Ironisnya, tidak banyak orang Indonesia yang mengerti terhadap apa yang sesungguhnya telah, sedang, dan akan terjadi di Timor-Timur, karena Pemerintah mencengkeram arus informasi dari wilayah itu. Padahal tekanan yang diberikan kepada Indonesia oleh dunia internasional pasti akan dirasakan oleh rakyat pada umumnya.³⁷

B. Timor-Timur Di Mata RI

Selama 23 tahun lebih, Indonesia menganggap kehadirannya di Timor-Timur adalah atas undangan mayoritas masyarakat untuk berintegrasi dengan NKRI. Pada tahun 1976 setelah melancarkan perang total terhadap rakyat Timor-Timur, wilayah itu di klaim sebagai propinsi ke-27 dari NKRI, dan dapat disahkan oleh DPR melalui UU No 7/ 1976. Dua tahun kemudian, MPR mengeluarkan TAP VI/MPR/1978, yang mensahkan penambahan wilayah tersebut. Di pihak lain, PBB menganggap serbuan dan pencaplokan wilayah itu oleh Pemerintah Indonesia, sebagai tindakan ilegal. Selama 23 tahun PBB tetap menganggap

³⁷ Jurnal CAVR, "Timor Lorosa'e Sebuah Tragedi Kemanusiaan," Dili 1999, *ibid* hlm .5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Timor-Timur sebagai wilayah yang tak berpemerintahan sendiri (*Non-self Governing teritoty*), dan Portugal sebagai penguasa Administratif.³⁸

Melalui perjuangan panjang dan klaim mengklaim mengenai pencaplokan Timor-Timur ke dalam NKRI, akhirnya Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang selama ini memperjuangkan wilayah tersebut di dunia internasional, kini menyatakan Indonesia siap melepaskan Timor-Timur, jika otonomi luas yang ditawarkan di tolak oleh masyarakat Timor-Timur. Dengan pernyataan Menlu tersebut, sekarang mulai terbukalah mata Indonesia terhadap kebohongan terbesar yang dilakukannya di Timor-Timur. Intinya itu, sekarang Indonesia harus serahkan semuanya kepada masyarakat Timor-Timur untuk menentukan nasib sendiri.³⁹

Melalui pernyataan tersebut, banyak pihak juga menilai perubahan sikap politik Pemerintah Indonesia dalam soal Timor-Timur, sebagai usaha terakhir untuk membuang *kerikil dalam sepatu* Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh juru bicara Presiden Habibie, Dewi Fortuna Anwar dalam dialog interaktif di RCTI, bahwa dengan menyelesaikan persoalan Timor-Timur secara hormat, maka bangsa Indonesia kembali kepada “khitahnya” sebagai pelopor kemerdekaan, anti kolonialisme. Menurut Asisten Mensesneg urusan Luar Negeri itu, akibat keterlibatan bangsa Indonesia dalam konflik Timor-Timur, Indonesia telah dituduh sebagai agresor kolonialis. Pernyataan yang bersifat pengakuan akan beratnya masalah Timor-Timur, juga diungkapkan oleh Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita di sela-sela pertemuan forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss

³⁸ Jurnal *CAVR*, hlm. 2

³⁹ Frans Magnis Suseno, *Revolusi Omong Kosong*, Jakarta 1999, hlm . 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“Timor-Timur bagi Indonesia terlalu mahal, baik secara ekonomis maupun politis.”

Terlepas dari niat baik Presiden Habibie yang tidak ingin generasi Indonesia dibebani masalah Timor-Timur, fakta di lapangan tidak merefleksikan apa yang diungkapkan di Pusat. Dan dalam realisme politik, orang lebih melihat kenyataan daripada mendengar pernyataan. Dari kenyataan di lapangan itulah, akhirnya membuat banyak orang secara kolektif menciptakan “hantu” perang saudara yang membayangi Timor-Timur, bahwa bila memilih opsi merdeka yang dalam kecamata Pemerintah Indonesia sebagai pilihan terburuk.⁴⁰

Timor-Timur memang senantiasa menghadirkan masalah, terutama dalam hal diplomasi. Pemberian bantuan oleh negara Eropa, Amerika Serikat senantiasa mengaitkan bantuan itu dengan pelaksanaan HAM yang salah satunya, setuju dengan diadakannya referendum di Timor-Timur. Sayidiman Suryohadiprojo, mengakui bahwa masalah Timor-Timur telah menurunkan martabat Indonesia di mata dunia internasional. Sudah lama bangsa Indonesia harus mengalami pukulan-pukulan yang menyakitkan dan menurunkan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Demikian ungkapan Saydiman seperti yang termuat dalam karyanya , kepemimpinan ABRI (1996). Dan tentunya kasus kemenangan pro kemerdekaan ini, menjadi petaka yang paling menyakitkan bagi bangsa Indonesia.

Selama ini memang Indonesia tidak berhasil meyakinkan PBB dan dunia internasional, bahwa Timor-Timur merupakan wilayah Indonesia yang sah, justru sebaliknya Indonesia selalu dipersalahkan karena menganeksasi Timor-Timur

⁴⁰ Majalah *Talitakum*, “Merdeka Siapa Takut”, Dili 1999, hlm .10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang sebelumnya dijajah oleh Portugal. Lemahnya Pemerintah Habibie disadari betul oleh dunia internasional, yang akhirnya menekan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor-Timur dengan cara mereka. Beberapa kalangan melihat bahwa tekanan dunia Internasional sangat berpengaruh dalam opsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Habibie. Saya mensinyalir opsi yang dikeluarkan oleh Habibie, berkaitan dengan krisis yang sedang melanda Indonesia “jelas Muhaimin.”⁴¹

C. Timor-Timur Di Mata Orang Timor-Timur

Selama 24 tahun Timor-Timur berintegrasi dengan NKRI, memang mengalami pembangunan sarana dan prasarana yang sangat maju. Lebih dari 1 triliun per tahun, yang dapat dialokasikan untuk pembangunan Timor-Timur. Walaupun sebagian dana yang dicairkan tidak semuanya sampai pada daerah, akan tetapi jejak proyek pembangunan tetap kelihatan. Sementara kalau kita melihat secara saksama, Timor-Timur yang di bawah era penjajahan Portugal, jauh lebih tertinggal. Namun terbukti pula bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan secara gencar oleh Pemerintah Indonesia, tidak memuaskan masyarakat Timor-Timur.

Dalam wawancaranya, Mario Viegas Carascalao menyatakan, bahwa selama 23 tahun Pemerintah Indonesia tidak berhasil mengambil hati masyarakat Timor-Timur. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pola-pola pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Timor-Timur itu, tidak diciptakan

⁴¹ Majalah *Demokrat*, “Habibie Mementingkan Diri Sendiri”, Surabaya 1999, hlm .5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berdasarkan persepsi yang benar tentang kebutuhan rakyat Timor-Timur. Maka walaupun dana yang dicurahkan begitu besar jumlahnya, tetap tidak memberi jawaban yang tepat atas tuntutan rakyat Timor-Timur. Satu gambaran kecil yang bisa kita lihat, begini; kalau jaman Portugis hanya ada 12 Km aspal, sekarang ada lebih dari 1000 Km. Masyarakat menyatakan bahwa aspal ini bukan jalan untuk kami, tetapi untuk bapak-bapak besar. Ini berarti pembangunan yang di bangun oleh Pemerintah Indonesia tidak menyentuh.

Selama beliau menjabat sebagai Gubernur, menerima rakyat beberapa kali yang datang meminta bantuan untuk membayar BP3 anaknya di sekolah. Kebijakan Pemerintah dengan pembangunan yang sangat maju, tapi tidak ada satu sistem pengkreditan terhadap rakyat di Timor-Timur untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah merasa seolah-olah semua masyarakat memiliki tanah, sehingga untuk mengajukan kredit harus ada jaminan. Kalau ingin memperoleh jaminan dari rakyat, justru jangan mempersulit rakyat untuk memperoleh sertifikat yang nantinya bisa dipakai sebagai jaminan. Sementara tanah yang dimiliki oleh misi katolik pun menurut hukum RI, bahwa itu bukan hak milik, akan tetapi hanya hak pakai. Hal seperti inilah yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, karena tidak sesuai dengan adat orang Timor-Timur. Terlebih lagi, kalau kita lihat kepadatan penduduk Timor-Timur, kira-kira 50 orang per Km persegi, tapi program yang di jalankan oleh Pemerintah, justru program KB yang tidak sesuai dengan doktrin Katholik yang menyatakan tumbuh dan memperbanyak diri. Selain itu dalam falsafahnya, orang Timor-Timur itu mempunyai struktur tradisional berdasarkan kekeluargaan yang saling membantu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tapi kebiasaan ini, saat pendudukan Indonesia semua di rubah. Suco di jadikan desa yang belum tentu di akui oleh masyarakat. Mengapa Pemerintah Indonesia tidak mencoba mencari jawaban dari kenyataan bahwa, selama ini yang justru aktif melawan Indonesia adalah orang-orang yang merupakan hasil didikan Pemerintah Indonesia.⁴²

Mayoritas masyarakat Timor-Timur semulanya bisa dikatakan antusias bergabung dengan NKRI, tapi akhirnya terpaksa harus menuntut untuk melepaskan diri karena merasa tertekan dan tertindas harkat dan martabatnya. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia terutama ABRI, menggunakan pendekatan secara militer. Seandainya Pemerintah dapat menggunakan pendekatan sosial dan budaya serta perlakuan secara baik, mengingat masyarakat Timor-Timur mempunyai budaya yang sangat homogen, mungkin keinginan dan perjuangan masyarakat Timor-Timur untuk memisahkan diri kecil kemungkinan terjadi, walaupun ditinjau dari segi sejarah dan penjajahannya sangat berbeda.⁴³ Namun invasi yang dilakukan secara terselubung oleh tentara Indonesia, membawa cerita lain bagi masyarakat Timor-Timur yang sebelumnya hanya dalam hal pandangan politik. Setelah campur tangan Pemerintah Indonesia, pandangan politik Timor-Timur berubah menjadi pro dan kontra terhadap wilayah tersebut.

Ditegaskan lagi bahwa masyarakat Timor-Timur secara mayoritas, tidak memungkiri diri bahwa pembangunan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, telah banyak menunjukkan keberhasilannya. Tapi tidak berguna kalau

⁴² Majalah *Talitakum*, "Merdeka Siapa Takut", Dili 1999, hlm 29

⁴³ *Kompas*, "Lawatan Xanana Bukan Babak Baru Hubungan dengan Indonesia," Jakarta 2000, hlm. 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

gedung yang setinggi langit, hanya dapat di bangun di atas tulang-tulang berserakah, tumpahan darah, tetesan air mata dan rintihan yang keluar dari mulut setiap manusia Timor-Timur. Pada prinsipnya masyarakat Timor-Timur tidak terlalu memprioritaskan masalah pembangunan yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebebasan, keamanan, keadilan serta kedamaian atas harkat dan martabat manusia Timor-Timur, tanpa ada politik diskriminasi. Namun sejarah tidak mengenal pengandaian, Timor-Timur telah menjadi negara merdeka. Tentu tidak relevan lagi untuk mengais kesalahan kedua pihak di masa lalu. Kini yang paling penting bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timor Leste, tidak kehilangan kemampuan untuk menarik hikmah dari pengalaman di masa lalu, termasuk yang pahit sekalipun.⁴⁴ Sangatlah menarik, Indonesia dan Timor Leste sama-sama ingin melepaskan diri dari kesalahan masa lalu. Kedua pihak berusaha memasuki babak baru mengenai hubungan yang lebih menekankan pada kerjasama dan persahabatan.

⁴⁴ *Kompas*, Jakarta 1999 hlm 4

BAB III

PROSES PELAKSANAAN REFERENDUM TAHUN 1999

SECARA CEPAT DI TIMOR-TIMUR

Menjelang pelaksanaan referendum di Timor-Timur pada tanggal 8 Agustus 1999, telah terjadi banyak pergesekkan fisik yang sangat signifikan dan banyak korban jiwa, terutama di kalangan masyarakat sipil yang tak berdosa. Pergesekan fisik itu terjadi dan merebak hampir ke seluruh wilayah Timor-Timur. Sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan hati semua pihak yang selama ini sangat mendambakan terciptanya suatu kedamaian di wilayah yang sarat dengan tindak kekerasan politik tersebut.

Pergesekkan fisik yang dapat diwarnai dengan tindak kekerasan itu, dapat dilakukan oleh manusia-manusia yang masih ingin melihat kehancuran masyarakat wilayah tersebut, dan kelihatannya akan mengancam proses pelaksanaan referendum yang menjadi inti dari kesepakatan Triparti antara Portugal, Indonesia di bawah naungan PBB. Dapatkah situasi tersebut berhasil menyelesaikan konflik politik Timor-Timur melalui sarana referendum yang demokratis ?

Dalam tulisan ini, tampil beberapa hal menyangkut pelaksanaan referendum di Timor-Timur, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1999, namun dapat ditunda pada tanggal 30 Agustus 1999, yaitu sebuah tanggal yang kelihatannya masih belum definitive. Alasan yang dapat menyebabkan penundaan tanggal pelaksanaan jajak pendapat tersebut antara lain;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertama, masalah teknis yaitu masih kurangnya kelengkapan persyaratan administratif dari staf Internasional. *Kedua*, para calon pemilih, belum mengetahui lokasi pendaftaran serta informasi dan sosialisasi tentang proses atau prosedur pendaftaran pemilih sebagian belum sampai pada masyarakat yang ada di pedesaan. *Ketiga*, situasi keamanan di kota Dili maupun di distrik lainnya, belum terjamin agar masyarakat merasa bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), yang sebenarnya merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya jajak pendapat yang jujur dan adil.

Hal yang sama juga dilakukan pada saat pengumuman hasil jajak pendapat yang sebenarnya dapat diumumkan pada tanggal 7 september 1999, namun harus dipercepat pada tanggal 4 september 1999. Faktor yang menyebabkan dipercepatnya pengumuman hasil jajak pendapat tersebut antara lain bahwa, mengingat karena pada saat itu muncul konflik yang sangat dahsyat antara dua kelompok yang sementara bertikai yaitu pro dan kontra referendum. Oleh karena itu alasan dipercepatnya pengumuman hasil jajak pendapat, yaitu agar dapat menghindari konflik yang semakin meningkat. Karena bila pengumuman dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan, maka korban jiwa terutama pada masyarakat sipil, akan semakin meningkat pula.

Masalah Timor-Timur memang dalam proses pembicaraan tentang penyelesaiannya, tidak dilibatkan masyarakat yang selama kurang lebih 24 tahun, bersama Indonesia, dan hanya dapat dijadikan sebagai penonton bagi setiap permasalahannya. Bagi masyarakat Timor Lorosa'e terlibat dan tidaknya, hal ini tidak menjadi soal karena pada saat itu, Timor Lorosa'e masih dalam proses



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dekolonisasi, walaupun Indonesia tidak mengemukakannya. Tapi Indonesia telah menerima bahwa masalah Timor-Timur itu adalah masalah dekolonisasi, sehingga dapat diserahkan kepada PBB. Portugal sendiri tidak akan menerima penyelesaian apapun, apabila tidak dilakukan melalui sidang Dewan PBB. Yang menjadi persoalan adalah keadaan situasi keamanan di Timor-Timur saat itu, tentunya tidak terlepas atau terpicu oleh masih terdapatnya perbedaan pandangan dalam organ pemerintah Habibie soal dua opsi pelepasan Timor-Timur.

Dalam tubuh kabinet Habibie, masih terdapat kelompok militer konservatif yang masih menentang opsi lepasnya Timor-Timur dari NKRI. Hal ini yang dapat merambat ke lapangan, sehingga TNI dan Polri di Timor-Timur sulit untuk memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Kesulitan TNI dan Polri dapat dilihat melalui kasus pembantaian massal di Liquisa, di kediamannya Manuel Viegas Carascalao dan kasus lain yang terus terjadi menjelang jajak pendapat. Keterlibatan dan keberpihakan TNI dapat diformulasikan dalam sikapnya seperti; melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, membiarkan, serta membolehkan tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh milisi-milisi pro-integrasi.⁴⁵

A. Indonesia.

Bagi pemerintah Jakarta yang menjadi target utama dalam era reformasi ini, adalah bagaimana caranya untuk memenangkan jajak pendapat 8 Agustus 1999, mengenai status politik Timor-Timur yang selama ini seperti kata Menlu

⁴⁵ Majalah *Gevatil*, Dili 1999. *Otonomi (Bagian dari RI) atau Merdeka menjadi negara berdaulat*. hlm. 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ali Alatas “Sebagai Kerikil dalam Sepatu Pemerintah Indonesia” . dalam proses inilah Pemerintah Jakarta dengan TNI-nya membentuk berbagai organisasi sebagai alat untuk melakukan manuver-manuver politik demi menggolkan otonomi tawarannya.

Menurut Pemerintah Indonesia, otonomi khusus adalah pilihan terbaik bagi masa depan Timor-Timur, di mana beberapa petinggi militer Indonesia secara terbuka menyatakan bahwa perang saudara akan berkobar di Timor-Timur bila masyarakat memilih merdeka. Di sini terdapat beberapa upaya rekayasa jauh sebelum ditandatanganinya draft otonomi tersebut yang didukung kuat oleh TNI untuk melakukan beberapa langkah sebagai upaya menyasati keadaan dalam memenangkan status otonomi. Di antaranya sebagai berikut; *Pertama*, membentuk opini secara luas tentang adanya perang saudara jika Timor-Timur merdeka. Sebagai wujud dari upaya tersebut, diciptakannya kondisi dilapangan untuk mendukung pernyataan yang menyesatkan itu, yaitu membentuk kelompok milisi diberbagai daerah dan bahkan membentuk berbagai organisasi sebagai support sistem bagi proyek tersebut. Maka menurut radio BBC, dana yang disuplai, angkanya mencapai triliunan rupiah. *Kedua*, mendramatisir kondisi buruk suatu Timor-Timur merdeka, dengan berbagai macam gambaran tentang prospek ekonomi Timor-Timur yang suram, minimnya sumber daya manusia (SDM), kondisi geografis dan geopolitik yang tidak menguntungkan dan berbagai dalil yang meyesatkan. *Ketiga*, menggunakan orang Timor-Timur untuk menyuarakan kepentingan Jakarta. Dalam menjalankan misinya pihak TNI dan pemerintah Indonesia tidak langsung tampil menyuarakan kepentingannya, akan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tetapi menggunakan orang Timor-Timur yang secara kebetulan bersedia duduk dalam berbagai organisasi tersebut. Hal ini terlihat seperti, memaksa orang-orang Timor-Timur untuk menggungsi keberbatasan NTT, Kupang, dan Ujung Pandang. Kemudian melalui FPKD (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan), KOTBD (Klibur Oan Timor ba Damai). Menuntut PBB untuk menyediakan tempat pemungutan suara pada tempat-tempat yang telah disiapkan. Diduga, hal ini dilakukan untuk memasukkan orang luar Timor-Timur yang memiliki ciri dan nama yang menyerupai orang Timor-Timur dalam jajak pendapat yang akan dilaksanakan. *Keempat*, menuntut agar orang Timor-Timur di luar negeri tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye di Timor-Timur. Hal ini karena adanya kekhawatiran bahwa jika memberi peluang kepada orang Timor-Timur yang ada di luar negeri, maka akan membuka peluang pula kemenangan bagi pihak pro-kemerdekaan. Sudah pasti bahwa pengaruh orang-orang di luar negeri yang pro-kemerdekaan akan lebih besar. *Kelima*, mempengaruhi mahasiswa Timor-Timur yang ada di Indonesia (Jawa, Bali, Sulawesi dan sebagainya). Upaya ini dilakukan untuk menghindari beberapa hal, di antaranya; kampanye keluarga oleh mahasiswa pro-kemerdekaan yang akan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Bila terjadi maka paling sedikit 4000-6000 mahasiswa pro-kemerdekaan akan tersebar diseluruh Timor-Timur dan secara aktif melakukan kampanye kepada keluarganya. *Keenam*, mengusulkan agar adanya perwira penghubung dari TNI bagi kegiatan UNAMET, sehingga musuh kelompok pro-Jakarta bukan sebagai musuh TNI. *Ketujuh*, melakukan laporan palsu atas nama kelompok pro-kemerdekaan (CNRT) kepada pihak UNAMET. Hal tersebut dapat dilakukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk mendiskreditkan rasa kepercayaan pihak UNAMET kepada laporan pihak pro-kemerdekaan. *Kedelapan*, melakukan teror, intimidasi dan cara-cara represi lainnya yang dapat menimbulkan trauma pada masyarakat, dengan harapan agar masyarakat terbebani dalam banyangan di atas, sehingga terpaksa memiliki otonomi.

Dengan beberapa indikasi rekayasa dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada niat dari Pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan persoalan Timor-Timur secara damai dan dapat diterima secara internasional. Boleh dikatakan sebagai keinginan setengah hati dari Presiden Habibie untuk mencari publisitas sebagai seorang pemimpin besar yang demokaratis.⁴⁶

B. Timor-Timur

Sejarah menilai retorika-retorika politik sebagaimana diuraikan di atas, jelas dipakai oleh fraksi-fraksi yang bertikai untuk menekan masyarakat agar dapat mendukung dan memenangkan referendum. Namun fakta sejarah selama kurang lebih 24 tahun tentang konflik tersebut, yang lebih menentukan. Kemampuan retorika politik apapun yang akan dipakai oleh fraksi-fraksi tersebut, bahasa yang dituliskan secara historis dalam hati dan pikiran setiap orang Timor-Timur menjadi dasar atau kerangka acuan yang tak terbantahkan baginya untuk menilai dan memilih tawaran-tawaran politik referendum.

Keadaan konflik politik selama kurang lebih seperempat abad, telah menjadi sumber penilaian politik bagi masyarakat. Tentu bisa bermanfaat sebagai

⁴⁶ Majalah *Talitakum*, Dili 1999. *Tolak Otonomi*. Edisi 5, hal.12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sumber untuk studi dan analisa bagi para pengamat politik, dan berfungsi juga sebagai hakim untuk mengadili atau menilai benar salahnya opsi-opsi yang dilakukan di Timor-Timur. Sekurang-kurangnya bisa diyakini bahwa akal sehat dan nurani manusia Timor-Timur tentu saja tidak mau terulang kembali dehumanisasi atas dirinya. Maka hal yang harus dipersiapkan orang Timor-Timur terutama para politisi, adalah melatih diri untuk berbesar hati dan berjiwa besar guna menerima hasil apapun, jika kalau memang referendum itu dilakukan secara jujur dan adil. Namun yang dikhawatirkan fraksi pro-otonomi, bahwa jika fraksi pro-merdeka memenangkan proses referendum tersebut, maka kemungkinan besar akan terjadi perang saudara.⁴⁷

Sejarah telah mencatat berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri. Perang adalah salah satu malapetaka kemanusiaan terdahsyat yang pernah diciptakan manusia sepanjang peradabannya. Jika ada bangsa di dunia ini yang tak pernah mengalami malapetaka ini, masih sedikit yang terungkap dalam buku sejarah. Sejarah hanya mencatat bahwa satu-satunya negara di dunia yang selain tak pernah dijajah juga tak pernah menjajah adalah Thailand, meskipun hal ini tak berarti bahwa di negeri SIAM itu tidak pernah terjadi dalam perang dalam sejarahnya.

Sejarah memang memainkan peranan yang cukup berarti bagi peradaban umat manusia. Maka tidak salah sejumlah tokoh tidak pernah melupakan sejarah bangsanya, patut diacungkan jempol. Bangsa-bangsa yang menjadi besar dan kuat saat ini, karena generasinya selalu bercermin pada sejarah bangsanya. Amerika

⁴⁷ Majalah *Gevatil*, Dili 1999, hal 17.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Serikat dan Inggris adalah dua bangsa yang menurut beberapa pakar sejarah menjadi kuat dan unik, berkat terjadi perang saudara di abad 17 dan 18. Bagi orang Amerika Serikat atau bahkan bagi dunia, nama Abraham Lincoln tak bisa terhapus dari sejarah karena “*Emancipation Proclamationnya*” yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1863. Saat itu Amerika Serikat sedang memasuki tahun ketiga perang saudara. Berawal dari “*The Bishop’s Wars*” tahun 1639 hingga pertempuran *Worcester* 1631 yang mengakibatkan hengkangnya raja Inggris Charles II ke Prancis karena dikalahkan pasukan dari pihak pro-parlemen yang dipimpin Oliver Cromwell. Bagi Inggris, abad 17 merupakan periode yang meninggalkan pelajaran sangat berharga yang masih relevan hingga kini.

Kini kedua bangsa itu, menjadi negara kuat baik secara ekonomi, politik maupun militer. Selain itu, organisasi-organisasi kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang juga bermarkas di kedua negara tersebut. Untuk Indonesia? Meskipun di masa silam terkenal dengan “*Gemah ripa loh jenawi, tata tenteram kertoraharjo*” tak terhitung jumlah pertempuran berdarah yang mengambil tempat di Nusantara ini, baik di masa kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Mengapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa, padahal sama-sama mendiami pulau Jawa?

Pemberontakan Madiun tahun 1948, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), dan terakhir apa yang oleh rezim Orde Baru Indonesia dikenal dengan G30/SPKI yang terjadi tahun 1965. Tanpa perlu berusaha mengklarifikasikan apakah semua itu perang saudara atau bukan? Yang pasti peperangan itu terjadi antara sesama penghuni

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nusantara sendiri yang kini bernaung di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Terus bagaimana dengan Timor-Timur ? bahwa perang saudara akan terjadi jika mayoritas masyarakat menolak otonomi luas, demikian menurut para pejabat Indonesia di Jakarta. Dan kalau pun itu terjadi perang, bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar bagi sebuah bangsa yang baru merdeka. Sewajar pertempuran yang terjadi di Amerika Serikat pada abad 18, ketika sejumlah negara bagian menyatakan untuk keluar dari perserikatan, dan di Inggris pada abad 17, ketika kekuatan pro-parlemen berperang melawan kerajaan dan pendukungnya. Dan tentunya juga seperti pertempuran yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menyakini, bahwa perang saudara akan betul-betul terjadi di Timor-Timur kalau sampai melepaskan diri dari NKRI sama dengan mengaggap rakyat Timor-Timur adalah bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarahnya. Justru kemerdekaan dari Timor-Timur, selain menjadi tanda peringatan bagi bangsa lain yang telah mengkhianati sejarahnya sendiri, sekaligus akan mengingatkan rakyat untuk tidak melupakan kontribusi Timor-Timur bagi perkembangan sejarah peradaban umat manusia sejagat. Jika sudah sampai di sini, maka peperangan di masa lalu entah itu perang saudara bukan lagi hantu yang harus ditakuti, akan tetapi merupakan mahaguru bagi penataan masa depan bangsa itu sendiri.⁴⁸

⁴⁸ Majalah *Talitakum*, Dili 1999. *Tolak Otonomi*. Edisi 3, hlm.33-34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. PBB

Dunia internasional menyambut baik kesepakatan 5 Mei 1999 sebagai langkah maju dalam proses penyelesaian masalah Timor Lorosa'e. Akan tetapi masyarakat Timor Lorosa'e sendiri masih mempertanyakan hal-hal mengenai masalah keamanan yang rencananya dapat dipercayakan kepada Pemerintah Indonesia. Pengalaman buruk selama dengan TNI dan Polri dalam waktu kurang lebih 24 tahun, membuat rakyat tidak mudah percaya karena sikap dan perilaku aparat hanya akan berubah karena sebuah kesepakatan Internasional.

Kekhawatiran tersebut ternyata beralasan, bahwa kelompok milisi pro-otonomi dengan dukungan TNI dan Polri dalam waktu enam bulan, jelas-jelas dapat melakukan gangguan keamanan di berbagai tempat dan sekurang-kurangnya 200-an orang tewas mengenaskan serta banyak kehilangan tempat tinggal. Namun penyelenggaraan misi PBB terhadap isi kesepakatan 5 Mei, terus berlangsung. Aksi tersebut sangat mengganggu proses jajak pendapat dengan cara yang digunakan seperti; berbagai propaganda, teror dan intimidasi serta represi yang seharusnya rakyat memilih sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan, agar menunjukkan kepada dunia internasional bahwa, mayoritas masyarakat Timor Lorosa'e mendukung otonomi, dan ingin tetap bergabung dengan NKRI. Dalam keadaan tersebut, Sekjen PBB melalui misi internasionalnya terpaksa harus mempercepat proses jajak pendapat di Timor Lorosa'e, yang sebenarnya baru dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Namun karena aksi kekerasan yang dilakukan, terhadap rakyat sipil, dan juga kepada petugas UNAMET di beberapa daerah, maka tanggal yang telah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ditetapkan, dipercepat dapat dipercepat dua hari dari jadwal yang sebenarnya, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1999.

Hari-hari setelah pemungutan suara, justru situasi semakin panas, karena milisi pro-otonomi terus meningkatkan aksi-aksinya. Pada tanggal 1 september 1999 terjadi penyerangan terhadap penduduk yang mencoba mencari perlindungan di Markas UNAMET, yang dianggap cukup aman. Namun melihat ketegangan dan penyerangan yang terus membabi buta, UNAMET akhirnya harus meninggalkan markasnya dan dengan beberapa pengungsi lainnya ke luar negeri (Australia). Tegangnya situasi tersebut, akhirnya keputusan untuk mempercepat pengumuman hasil jajak pendapat pun, segera diumumkan pada tanggal 4 september 1999, dengan hasil 78,5% masyarakat Timor Lorosa'e dapat menolak otonomi, yang berarti bahwa Rakyat Timor Lorosa'e ingin merdeka. Hasil tersebut diumumkan setelah 8 bulan lebih rakyat Timor Lorosa'e ditekan dengan berbagai macam cara, yang kurang signifikan terhadap rakyat yang tidak berdosa. Berbagai pihak dapat memperkirakan jika jajak pendapat berlangsung dalam suasana damai dan fair, maka jumlah masyarakat yang menolak otonomi akan semakin besar.⁴⁸

⁴⁸ Majalah *Talitakum*, Dili 1999. *Timor Lorosa'e Sebuah Tragedi Kemanusiaan*. hlm 23

BAB IV

DAMPAK REFERENDUM TAHUN 1999 TERHADAP TIMOR-TIMUR

Bangkitnya kesadaran kritis membuka jalan kearah pengungkapan ketidakpuasan sosial secara tepat karena ketidakpuasan itu adalah unsur-unsur yang nyata dari sebuah situasi yang menindas. Hanya dengan mengambil resiko hiduplah kebebasan dapat dicapai... seseorang yang tidak mempertaruhkan hidupnya, tidak diragukan memang, dapat diakui sebagai pribadi; tetapi Ia tidak akan mencapai hakekat pengakuan tersebut, yakni sebagai kesadaran diri yang mandiri.

Kesenangan untuk berkuasa mutlak atas diri orang lain, sesungguhnya dapat didorong oleh sikap kejiwaan yang sadistis. Dengan kata lain bahwa tujuan sadisme adalah mengubah seorang manusia menjadi sebuah benda, mengubah yang berjiwa menjadi sesuatu yang tak berjiwa, karena dengan adanya pengawasan mutlak dan menyeluruh, maka kehidupan kehilangan salah satu kualitasnya yang sangat mendasar adalah kebebasan. Kebebasan menghendaki manusia yang aktif dan bertanggungjawab, bukan budak. Jika kondisi sosial mengarah kepada kehidupan otomaton, hasilnya bukan berupa cinta kehidupan tapi cinta akan kematian.⁴⁹

Timor Lorosae, sebelum dan sesudah pasca jajak pendapat masyarakat sipil yang tak berdosa telah dibantai dengan sadis, tewas mengenaskan mengucurkan darah segar, mati tergelatak berserakan di sepanjang jalan bagai

⁴⁹ Paul Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Penerbit LP3ES. Jakarta, 1985. hlm 47

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bangkai-bangkai busuk yang seolah-olah disiapkan menjadi makanan binatang liar dan serangga-serangga pengisap darah. Terdengar sayatan tangis pengungsi, ibu-ibu yang menggendong anaknya, remaja-remaja yang sedang tumbuh menanti masa depannya, sedang berlarian bersembunyi ke pos-pos perlindungan untuk tidak menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Di sekitar Gereja Suai salah satu kabupaten yang kurang lebih 120 km arah selatan kota Dili, tidak kurang 80.000 warga tak berdosa terbirit ketakutan mencari perlindungan, mereka dipaksa guratan nasib penguasa menjadi tumbal dan sandaran permusuhan serta kebencian antara sesama karena ambisi kekuasaan yang tidak lain berbijak pada akar-akar kemanusiaan.

Jumlah pengungsi terus bertambah, mereka berada dalam tekanan psikologis, berada dalam pusaran nasib antara hidup dan mati. Ataupun masyarakat sipil adalah manusia-manusia yang telah diproyeksikan menjadi instrumen mati oleh suatu skenario politik besar di era sekarang. Atau memang tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diperdebatkan karena manusia Timor Lorosae sedang diusir berduyun-duyun menjemput kematiannya, dan harus rela karena itu atas nama nasionalisme dan kemerdekaan. Tidak ada ruang yang imun dari serangan brutal dari kelompok yang tidak menerima hasil jajak pendapat, termasuk pula adanya kelompok selain milisi yang turut membakar suasana psikologis masa.⁵⁰

⁵⁰ Majalah *Demokrat*, Jakarta 1999. *Timor-Timur Realits Instruksional*. hlm. 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Dampak Bagi Indonesia.

1. Dampak politik

Lepasnya Timor Lorosae dari NKRI, secara otomatis telah meruntuhkan usaha diplomasi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama kurang lebih 24 tahun. Perjuangan diplomasi yang gagal, tentunya telah merubah citra politik Indonesia di mata dunia internasional. Dunia internasional juga melihat indonesia selama ini tidak memberi kebebasan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya selama kurang lebih 24 tahun kepada masyarakat Timor Lorosa'e. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah bahwa kehadiran Indonesia di Timor Lorosa'e dinilai dari berbagai pihak, terutama masyarakat Timor Lorosae, sebagai neo kolonialisme.

Lepasnya Timor Lorosa'e, sangat besar pengaruhnya terhadap daerah-daerah lain di Indonesia, seperti pertikaian yang sedang terjadi di Aceh, Irian, Ambon dan sebagainya, menuntut kepada Pemerintah agar diperlakukan hal yang sama seperti Timor Lorosa'e, yaitu merdeka atau lepas dari NKRI. Berkaitan dengan pemulihan nama baik dan citra bangsa Indonesia yang demikian terpuruk di mata dunia internasional, maka suka tak suka, Indonesia meskipun telah meninggalkan sejarah yang pahit terhadap Timor Lorosa'e, akan tetapi demi nama baik dan citra politik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia di mata dunia internasional,ada baiknya hubungan politik Indonesia dengan Timor Lorosa'e, harus segera dilakukan⁵¹

Setelah pasca referendum di Timor-Timur menjadi sebuah negara berdaulat, bagi Indonesia merupakan beban sejarah yang seakan-akan tak ada habisnya. Kasus demi kasus yang ada di tanah air, terus bergulir menyeret Indonesia kembali menghadapinya. Ibarat pusaran air yang begitu besar, terus berputar kencang mengangkat residu persoalan yang ada, serta membuat Indonesia seolah-olah tidak bisa keluar sepenuhnya dari seluruh perkara. Tanpa mengurangi arti adanya upaya yang telah dilakukan, perkara Timor-Timur agaknya menjadi persoalan yang terus hidup menggelayuti dan akan menjadi beban sejarah bagi generasi barunya.

Dari kacamata luar negeri, pengadilan HAM Timor-Timur adalah sebuah harapan baru, untuk menyelesaikan persoalan masa kini dan mengakhiri residu persolan masa lalu. Sebuah koreksi *fair* dan *legitimate* untuk menimbang dan mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalu sebagai langkah maju, memasuki era global dengan tuntutan dan standar internasional. Indonesia tidak mungkin mengingkarinya dan kembali kebelakang dengan segala resistensinya. Dari perspektif tersebut, adalah pada tempatnya bila Indonesia bisa menerima sebuah kenyataan pahit. Timor-Timur yang di masa lalu dipaksakan menjadi bagian dari NKRI dengan segala masalah di dalamnya. Ternyata persoalan tersebut, terdapat

⁵¹ Rapius Rais. *Disintegrasi Timor-Timur tahun 1999*. FKIP Sanata Dharma, hlm. 101

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

juga elemen-elemen kekuatan perlawanan dan aspek internasional yang justru menjadi kekuatan untuk mewakili aspirasi mayoritas masyarakat yang berkeinginan lain.

Pertarungan politik di masa lalu dengan mendomestifikasikan secara sepihak integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI, dari Portugal dan PBB akhirnya harus mendukung kemerdekaan dan dipertanggungjawabkan serta dipikul oleh pemerintah Indonesia. Tak heran seorang pengamat politik berani menyimpulkan bahwa, pilihan Indonesia untuk memaksakan integrasi dengan segala cara ditengah tantangan portugal dan PBB, adalah merupakan salah satu kekeliruan dari pilihan politik dan kebijakan yang berakibat fatal terhadap mayoritas masyarakat Timor-Timur. (John Magro “*is there justifiacation for an international criminal tribunal for east timor*), Murdoch Uni, September 2000). Dalam semangat yurisdiksi universal pelanggaran HAM yang berat harus ditebus dengan citra buruk. Masyarakat Internasional menanti pertanggungjawaban melalui proses peradilan yang kredibel, agar tak ada lagi *imunitas* dan *impunitas* terhadap pelaku pelanggaran HAM yang bersembunyi dibalik alasan perang sekalipun.⁵²

Hasil referendum Timor-Timur juga jelas berpengaruh terhadap bursa pemilihan presiden dalam sidang umum di Indonesia. Kemenangan pro-kemerdekaan jelas akan menjadi petaka bagi BJ. Habibie. Mayoritas masyarakat Indonesia menyadari bahwa Timor-Timur adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, lepasnya Timor-Timur

⁵² Kompas, Jakarta 2002. *Jangan di Belenggu Masa Lalu*. hlm. 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjadi ukuran lemahnya Habibie dalam mempertahankan kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia.

Kemenangan pro-kemerdekaan, menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi para pejuang yang kini tinggal di Panti Rehabilitas cacat di Seroja Bekasi Utara. Para Veteran dan Warakauri Timor-Timur menyayangkan opsi kedua yang telah diberikan kepada Pemerintah. Opsi yang sudah pasti dimenangkan oleh pro-kemerdekaan diciptakan penguasa, untuk melupakan orang-orang yang telah berjuang. Setiap bangsa yang ditawarkan untuk merdeka, sudah pasti memilih merdeka. Tidak saja di Timor-Timur, setiap propinsi yang ada di Indonesia pun akan menyatakan merdeka bila memang diberikan kesempatan yang sama. Hal inilah yang dikatakan oleh Prada Purn. Y.D. Heryanto, seorang prajurit yang selalu siaga mengedepankan tugas negara.

Menurutnya, opsi Habibie itu hanya membuka peluang untuk terjadinya kericuan-kericuan di Timor-Timur dan juga tentunya propinsi-propinsi lain di Indonesia. Sebab opsi kedua yang diberikan tersebut, sudah pasti akan menimbulkan dampak bagi daerah-daerah yang sekarang banyak konflik yang kemudian menyebar ke daerah-daerah yang relatif aman. Bagi warga Veteran dan Warakauri korban operasi Seroja, opsi yang ditawarkan BJ. Habibie itu, seakan-akan ingin menjadikan Veteran tersebut sebagai kelinci percobaan politiknya. Betapa tidak, karena pengorbanan yang telah banyak dilakukan oleh para Veteran tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan sesaat. Korban dari operasi Seroja

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pun selama ini tidak pernah mendapat jaminan yang layak dan memadai. Suatu tindakan yang tidak manusiawi di mana bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, namun yang sekarang terjadi justru sebaliknya, ujar Ny. Rantung sambil berlinang air mata.⁵³

2. Dampak Sosial Ekonomi

Banyak energi yang sudah dikeluarkan Pemerintah Indonesia selama kurang lebih 24 tahun untuk menyuapi Timor Lorosa'e. Memang selama itu pula hampir setiap bahasan Sidang Umum PBB, status Timor-Timur selalu saja membuat Menteri RI mengerutkan dahi. Kehadiran Timor Lorosa'e sempat membuat iri propinsi lain di Indosia, karena prioritas khusus selama rezim Soeharto diobral begitu saja. Jika dibanding propinsi lain di Indonesia, Timor Lorosa'e tergolong dimanjakan dan terus di perhatikan secara ekonomi. Yang terus menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak dilepas sejak dahulu? Hal ini adalah bagian bisul dari dosa Soeharto yang terpukau dengan kekayaan Timor Gap (Celah Timor), yang konon memiliki deposit minyak bumi, sehingga dia tergila-gila untuk mengeksploitasi berbagai tambang berharga di sana. Selain itu, Soeharto terobsesi oleh kehebatan Soekarno yang berhasil mengaet Irian Barat ke Indonesia, sehingga Soeharto juga ingin melakukan hal yang sama terhadap Timor Lorosa'e.

⁵³ Majalah *Demokrat*, Jakarta 1999. *Kemana Jasa Orang Tua Kami*. hlm. 13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keputusan Presiden BJ. Habibie mengkhawatirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, sendi-sendi ekonomi lumpuh, bantuan asing belum jelas kapan harus dicairkan. Padahal untuk membiayai daerah-daerah rawan seperti Timor Lorosa'e, dibutuhkan dana yang cukup banyak. Pemerintah pusat sekurang-kurangnya harus menyediakan Rp. 100 milyar per tahun untuk membangun bumi Lorosa'e.⁵⁴

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan Timor Lorosa'e sangat besar jumlahnya karena harus mengejar ketertinggalannya bila dibandingkan dengan propinsi lain. Sekarang anggaran belanja negara untuk Timor Lorosa'e bisa digunakan untuk membangun propinsi lain, dan selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lebih penting guna meningkatkan ekonomi rakyat ke taraf yang lebih baik.⁵⁵

Ratusan milyaran rupiah yang dibuang oleh Indonesia untuk mempertahankan operasi militer, dan membiaya masalah politik Timor Leste. Politik integrasi ternyata tidak didukung oleh rakyat Timor Lorosa'e, sebab pasca integrasi perlawanan gerilya dan pemuda-pemudi Timor Lorosa'e masih terus berlangsung hingga merdeka tahun 1999. Timor Lorosa'e pada saat itu kelontoran dana yang lebih besar, padahal nyaris tak ada yang bisa dipetik untuk memasukkan keuangan negara.⁵⁶

Lepasnya Timor Lorosa'e dari kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak dapat cuci tangan begitu saja, karena masalah

⁵⁴ Majalah *Oposisi*, Jakarta 1999. hlm. 6

⁵⁵ Majalah *Oposisi*, Jakarta 1999, hlm 7

⁵⁶ Majalah *Oposisi*, Jakarta 1998. hlm. V

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengenai penggungian yang berada di berbagai wilayah di Indonesia terutama Nusa Tenggara Timur (NTT), masih banyak jumlahnya yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini secara finansial, Indonesia juga harus siap mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menampung para penggungsi pasca jajak pendapat. Masih ada sekitar 90.000 orang penggungsi yang masih diurus Pemerintah Indonesia agar diberi bantuan, dicarikan tempat pemukiman yang layak serta menambah lapangan kerja. Sementara masyarakat Indonesia sekitar puluhan ribu orang yang masih nanggur. Hal ini menjadi beban berat bagi Pemerintah Indonesia, karena krisis ekonomi Indonesia sejak 1997 juga masih mencekik Indonesia sampai sekarang.

Pemerintah Indonesia sebagai pelaku ekonomi, juga bersama pihak swasta yang telah meninggalkan aset ekonomi di Timor Lorosa'e, mau tidak mau dengan rela harus kehilangan aset ekonominya di Timor Lorosa'e. Saat ini aset ekonomi Indonesia masih menjadi perdebatan antara kedua negara (Indonesia dan Timor Lorosa'e). Saling menuntut ekonomi di negara lama, hendaknya Pemerintah Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di dunia internasional. Karena menurut hukum internasional, aset ekonomi yang dimiliki Pemerintah negara lama, tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi di negara baru. Sedangkan aset ekonomi yang dimiliki oleh pihak swasta, negara baru harus mengakui dan melindunginya. Yang masih menjadi pertanyaan juga

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adalah apakah Indonesia menggunakan hukum internasional yang berlaku, ataukah menggunakan aturan hukum sendiri.⁵⁷

B. Dampak Bagi Timor Lorosa'e

1. Dampak Politik

Dampak terjadinya referendum di Timor Lorosa'e tahun 1999, dalam hal ini keadaan politik di Timor Lorosa'e sangat buruk. Penolakan terhadap kenyataan itu tidak hanya disampaikan melalui surat protes atau pernyataan pers, melainkan juga dengan melancarkan serangan fisik kepada masyarakat sipil yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Aksi itu sebagai tanda bagi kelompok milisi yang lain, untuk memulai serangan di setiap daerah. Dalam situasi inilah terjadi pembunuhan, penjarahan dan pembakaran di berbagai kota. Milisi pro-intergrasi TNI dan Polri melakukan operasi pembersihan di mana-mana. Ribuan masyarakat Timor Lorosa'e secara terpaksa menggungsi ke wilayah NTT yang dapat diawasi secara ketat oleh milisi, TNI dan Polri. Bangaimanapun, sebagian besar penduduk berhasil melarikan diri ke daerah pegunungan dengan keadaan yang luar biasa sulitnya karena tanpa makanan, pelayanan kesehatan dan tempat tinggal. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa di Dare atau salah satu basis tempat penggungsiian berkumpul belasan ribu penggungsi di

⁵⁷ Rapinus Rais, *ibid* hlm. 104

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mana setiap hari ada belasan bayi yang meninggal dunia karena kekurangan makanan dan kesehatan.⁵⁸

Tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat menyatakan penolakan mayoritas rakyat Timor Lorosa'e terhadap paket otonomi khusus. Tetapi dampak dari penolakan tersebut masyarakat Timor Lorosa'e harus menanggung akibat yang sangat mengerikan. Sejarah kebersamaan dengan Indonesia berakhir dalam sebuah perpisahan yang menyayat hati dan juga meletuskan bara dendam serta kebencian. Bumi Lorosa'e hangus, sejarah Timor Lorosa'e mengalami situasi sakral maut.

Perlu diketahui bahwa apa yang dimenangkan dalam jajak pendapat, bukanlah hasil dari sebuah kekuatan politik, bukan atas kekuatan Fretilin, RDTL atau CNRT, melainkan kesadaran moral politik rakyat.. Tidak akan ada suatu perubahan besar dalam sejarah Timor Lorosa'e jikalau rakyat mengambil sikap *indifrent* dihadapan nasibnya.³⁹

Jenderal besar A.H. Nasution mengatakan bahwa suatu perang gerilya yang memakan waktu lebih dari lima tahun, berarti ia didukung oleh rakyat. Itulah saripati dari teori gerilya perang semesta yang dicetuskannya ketika memimpin gerilya di Jawa sebagai Pangdam Siliwangi. Dengan Teori gerilya Nasution berhasil memberi inspirasi bagi

⁵⁸ Jurnal *Timor Lorosa'e*, Dili 1999. *Sebuah Tragedi Kemanusiaan*. Yayasan Hak dan FORTILOS. *Ibid*, hlm. 38

⁵⁹ Pe. Martinho Germano Da Silva Magno, Dili 2000. *Bunga Rampai. Menyongsong Tahun Kebebasan*. *Ibid*, hlm. 104

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perjuangan diplomatik Soekarno-Hatta untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional.⁶⁰

Orang yang kalah secara fisik, belum tentu kalah secara moral. Dalam dunia politik, moralitas yang hitam putih selalu tidak memberikan wawasan yang jelas. Harus diakui bahwa, konflik moralitas dalam politik kerap kali merupakan soal metafisik. Jika politik fisik selalu berhubungan dengan soal kalah menang atau pahlawan penghianat, maka masalah metafisik itu, pada akhirnya juga menyangkut pertanyaan-pertanyaan mendasar dan mendalam mengenai kebenaran, kebaikan dan keindahan.⁶¹

Sekarang kita menyaksikan sebuah cerita klasik mengenai sejumlah kaum politik yang mengakui dirinya sebagai pahlawan dan menganggap yang lainnya penghianat. Tidak pernah mengakui bahwa rakyat kecil yang menjadi korban. Kalau kita memperhatikan “pertengkaran” para politisi pasca jajak pendapat, bukanlah menyangkut nasib rakyat yang pernah mendukung kemerdekaan, melainkan mengenai nasib kursi atau jabatan yang harus diperoleh dan dipertahankan. Manusia Timor Lorosa’e selama beberapa dekade lalu, telah menjadi obyek dari sebuah kekejaman yang amat dahsyat dalam perjalanan sejarahnya termasuk kekejaman yang dilakukan pasca jajak pendapat tahun 1999. Tentunya masyarakat sipil Timor Lorosa’e selalu dihantui dengan sebuah pertanyaan “Mengapa kami yang selalu menjadi obyek sasaran kekerasan dari mereka yang ingin mendapat sebuah takhta kekuasaan” ? Persoalannya

⁶⁰ Pe. Martinho Germano Da Silva Magno. *Ibid* hlm. 122

⁶¹ Pe. Martinho Germano Da Silva Magno. *Ibid*, hlm. 61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sekarang, ketika Timor Lorosa'e memperoleh kemerdekaan, setiap orang mulai memperhitungkan jasa-jasanya.

Dua bulan yang lalu, anggota parlemen di negeri Timor Lorosa'e sempat membuat hebo. Pasalnya karena adanya saling vonis menvonis antara partai PSD dan Fretilin. PSD menuduh Fretilin sebagai partai yang otoriter, tersinggung dengan tuduhan itu, Fretilin sebagai partai mayoritas dengan pemenang kursi terbesar di parlemen langsung membalas pernyataan PSD dengan menyatakan bahwa seandainya partai Fretilin yang otoriter, maka anggota Fretilin bisa saja menghabisi pihak-pihak yang dulunya berkolaborasi dengan Indonesia serta jiwa dan semangat Fretilin tidak seperti saat sekarang. Tentunya pihak-pihak yang dulunya menjadi kolaborasi, sangat terpukul dengan pernyataan yang dilontarkan Fretilin di tengah-tengah gencarnya kampanye mengenai pentingnya Unidade Nasional dan rekonsiliasi yang bertujuan mengajak seluruh masyarakat Timor Lorosa'e tentunya, entah pro atau kontra untuk kembali bersatu.⁶²

Berbagai masalah politik yang sangat krusial harus dihadapi Timor Lorosa'e sebagai negara yang baru merdeka. Cita-cita menegakkan pemerintah yang demokratis di negeri baru ini, nampaknya "bagaikan jauh panggang dari bara". Situasi politik yang terjadi sehari-hari, dapat menggambarkan perseteruan antar elit politik. Para politisi hanya dapat berjuang demi kepentingan partainya, dan demi popularitas dirinya sehingga kini sistem pemerintah yang demokrasipun belum terwujud, yaitu

⁶² Majalah *Talitakum*, Dili 2002. *Perbedaan Berunjuk Pertikaian*. *Ibid* hlm. 7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mulai dari pembuatan undang-undang turunan yang tengah mau digarap sampai persoalan aset yang ditinggalkan Portugal dan Indonesia.⁶³

Situasi tersebut menghadapkan pemerintah pada pilihan yang cukup dilematis. Ibarat buah simalakama “Jika makan ibu mati, tidak dimakan bapak mati”. Ditambah lagi dengan belum adanya suatu perangkat hukum yang jelas menyangkut status aset-aset yang diperdebatkan. Sementara yang dapat dilakukan selama ini, hanyalah berupa kesepakatan di atas kertas yang ujung-ujungnya persoalan ini menjadi terkatung-katung karena dengan kepergian UNAMET, seharusnya masalah tersebut diambilalih kembali oleh Pemerintah Timor Lorosa’e. Namun penyelesaian tersebut, belum juga terwujud. Bukan warisan dan bukan hadiah, aset tersebut, hanya berupa bangunan yang dapat menghiasi negara Timor Lorosa’e. Oleh karena itu semua orang mulai dari Timor Lorosa’e, Indonesia dan Portugal tak segan-segannya melakukan klaim yang tidak punya dasar hukum yang jelas. Misalnya beberapa bulan lalu, ada selebaran yang dikeluarkan menteri kehakiman melalui *land and property* terhadap rumah-rumah yang ditempati masyarakat, baik secara individu maupun organisasi. Tak pelak, sikap pemerintah banyak dikritisi warga Timor Lorosa’e karena dianggap belum ada perangkat hukum yang jelas tentang pengambilalihan aset-aset tersebut. Dengan demikian rumitnya

⁶³ Majalah *Talitakum*, Dili 1999. *Stop Kkekerasan*. hlm. 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

persoalan aset ini tidak hanya datang dari dalam negeri sendiri, akan tetapi juga dua negara lainnya yaitu RI dan Portugal.⁶⁴

Dampak lainnya yang harus dihadapi oleh Pemerintah Timor Lorosa'e adalah menyangkut masalah Timor Gap. Mulai dari perjanjian 5 Juli 2001 yang dianggap sebagai kalangan sangat merugikan posisi Timor Lorosa'e, sampai dengan pengunduran diri Australia dari kesepakatan batas laut internasional. Menyikapi fenomena kekayaan alam Timor Lorosa'e yang menjadi polemik hangat menjelang penandatanganan Timor Sea treaty 20 Mei 2002 antara Pemerintah Timor Lorosa'e dengan Australia, beberapa NGO sepakat untuk melakukan diskusi rutin untuk membahas persoalan tersebut. Untuk pertama kalinya diskusi yang difasilitasi oleh NGO forum beberapa bulan lalu, mempertanyakan negosiasi Timor Gap. Hal ini karena proses negosiasi antara kedua negara dalam melakukan proses tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam setiap proses yang dilakukan. Alasan pengunduran diri Australia dari kesepakatan batas laut internasional itu, , karena Pemerintah Australia menghendaki agar Timor Lorosa'e dapat mengakui perjanjian perbatasan Timor Gap yang dibuat antara Indonesia dan Australia pada tahun 1989, di mana Australia akan mengklaim beberapa ladang minyak yang seharusnya milik Timor Lorosa'e, menjadi milik Australia. Sementara menurut Pemerintah Timor Lorosa'e, bahwa proses pengeksploitasian Celah Timor yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Australia tahun 1989 itu, adalah suatu tindakan yang ilegal.

⁶⁴ Majalah *Talitakum*, Dili 2002. *Rame-Rame Klaim Aset*. Edisi 42, hlm.10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Melalui NGO forum memaparkan argumentasinya dengan bertolak dari mekanisme penyelesaian perselisihan batas perairan laut yakni harus dilakukan melalui proses hukum konvensi PBB tentang hukum kedaulatan internasional (UNCLOS). Argumentasi penyelesaian yang dianjurkan oleh NGO forum antara lain, landas kontinental, garis tengah (median line) dan perselisihan batas samping laut Timor. Karena berdasarkan hukum kedaulatan internasional Timor Lorosa'e akan memperoleh wilayah yang lebih luas ke batas samping (Barat dan Timor perairan laut), Jika negosiasi Timor Gap tidak diproses melalui hukum Internasional, maka akan sangat merugikan rakyat Timor Lorosa'e.

Sementara itu Joao Carascalao dari partai UDT, melihat permasalahan Timor Gap dari dua aspek; *Pertama*, aspek politik. Bahwa secara politik Pemerintah Timor Lorosa'e belum melakukan konsultasi dengan parlemen nasional, apalagi dengan partai-partai politik dan kelompok masyarakat sipil lainnya. *Kedua*, secara teknik Pemerintah Timor Lorosa'e belum melakukan survey mengenai Timor Gap. Hal ini yang juga dapat ditekankan oleh Joao Carascalao, bahwa sebaiknya Pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia agar masyarakat Timor Lorosa'e sendiri bisa dilibatkan secara maksimal dalam mengelolah Timor Gap, bukan hanya menggunakan tenaga asing.

Menyaksikan bagaimana rumitnya proses negosiasi Timor Gap dan penyelesaian masalah batas laut, Mariano Sabino dari parlemen mengingatkan perlunya transparansi Pemerintah untuk menjelaskan



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

persoalan ini kepada masyarakat, sehingga konsekuensi apapun yang muncul dari persoalan tersebut, akan dimengerti dan dihadapi oleh masyarakat dengan sabar. Menurut Estanislau Saldanha dari *East Timor Study Group* (ETSG) berpresepsi bahwa sepertinnya gejala ini ada intervensi politik Australia terhadap Timor Lorosa'e. Hal tersebut di karenakan sampai saat ini, Timor Lorosa'e belum mempunyai keuangan negara yang cukup, untuk melaksanakan program pembangunan Timor Lorosa'e.⁶⁵

2. Dampak Sosial Ekonomi.

Kurun waktu yang belum begitu lama, Timor Lorosa'e meraih kemerdekaan dari Indonesia. Dalam perjalanan itu pula, negara tersebut menemui beberapa persoalan seputar perekonomiannya. Suatu situasi yang menimbulkan hancurnya perekonomian Timor Lorosa'e yang juga dirasakan cukup signifikan yaitu menyusul kekerasan pada jajak pendapat bulan Agustus 1999. Imbas dari kekerasan tersebut, telah memaksa kurang lebih separoh dari penduduk Timor Lorosa'e terpaksa harus meninggalkan wilayahnya. Ujung-ujungnya masyarakat yang langsung terkena imbas kekerasan tersebut, menjadi terlantar karena dapat ditandai dengan hancurnya infrastruktur fisik di wilayah Timor Lorosa'e. Dengan hancurnya infrastruktur tersebut, mengakibatkan tingkat aktivitas

⁶⁵ Majalah *Talitakum*, Dili 2002. *Minyak Timor Yang Selalu Menjadi Rebutan Pihak Asing*. Edisi 41, hlm. 12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perekonomian Timor Lorosa'e merosot tajam pada tahun 1999, yang dapat mencapai minus 35, dalam laju *Gross National Product* (GDP).

Pada periode ini, harga barang meningkat, untuk kategori jenis barang dan jasa pada tahun 1999-2000. Beberapa komoditas meningkat, karena dulunya disubsidi pada jaman Indonesia. Misalnya peralihan dari harga yang disubsidi oleh Indonesia ke harga dunia. Untuk minyak solar harga eceran telah dinaikkan kira-kira lima kali lipat. Harga barang lainnya pun naik, akibat pengrusakan rantai distribusi (termasuk pembakaran gudang, pencurian truk dan perginya para wirausahawan untuk menyelamatkan diri), serta meningkatnya marjin usaha grosir, eceran dan transportasi.

Rangkaian kekerasan dan penghancuran tersebut, dapat mendorong masyarakat Timor Lorosa'e harus bekerja keras. Realitas yang terjadi, bukan hanya terdapat di kota Dili, akan tetapi hampir diseluruh distrik lain di Timor Lorosa'e. Hal ini berkaitan dengan kehadiran internasional (dan daya belanja yang berkaitan)paling sedikit. Berhubung karena mata uang yang digunakan belum begitu banyak yang disosialisasikan kepada masyarakat.⁶⁶

Perlu diketahui bahwa mata uang dolar Amerika Serikat (AS), telah diakui sebagai mata uang resmi Timor Lorosa'e. Namun di banyak kalangan masyarakat Timor Lorosa'e, dolar masih kalah populer dengan mata uang rupiah. Mengapa ? Menurut Dr. Lucas Da costa Rektor Instituto

⁶⁶ Majalah *Talitakum*, Dili 2002. *Ada Apa di Ermera*. Edisi, 43 hlm.22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Superior Economica de Gestao (ISEG), bahwa penggunaan rupiah sangat besar di kalangan masyarakat, setidaknya mata uang tersebut memenuhi beberapa faktor pendukung. Misalnya sebagai alat transportasi yang efektif dan nilainya koresponden dengan daya beli masyarakat. Faktor lain menurut Dr. Lucas, bahwa penggunaan rupiah yang sangat besar di kalangan masyarakat, bisa dilihat dari dua dimensi. Sebagai cermin dan identitas masyarakat pengguna mata uang, dan sebagai alat transaksi. Setiap mata uang yang dikatakan sebagai alat transaksi yang efektif, menurut rektor ISEG tersebut, harus memenuhi tiga syarat. Yakni koresponden dengan daya beli masyarakat, mudah dihitung oleh masyarakat dan angka transaksi tidak menjadi lambang. Jadi apabila daya beli masyarakat tidak koresponden dengan nilai mata uang yang ada, maka membutuhkan perhitungan-perhitungan yang sangat rumit. Apalagi jumlah mata uang tertentu yang beredar, tidak dalam jumlah yang banyak, maka akan dapat menghambat transaksi (akibatnya dapat menghambat pertumbuhan perekonomian seperti yang sekarang terjadi di Timor Lorosa'e.⁶⁷

Banyak di kalangan masyarakat yang mengutarakan seputar sosialisasi mata uang dollar. Kebijakan baru ini, telah membuat banyak pihak mengkaji kembali secara kritis pengalaman PBB di negara-negara pasca konflik, seperti Kamboja. PBB yang pada saat itu hadir di Kamboja pada tahun 1992-1994 dengan misi UNTAC (United Nation Transition Administration In Cambodia), menetapkan mata uang dollar sebagai alat

⁶⁷ Majalah *Talitakum*, Dili 2001. *Dolar Keberuntungan Atau Masalah Baru*. Edisi 9, hlm 8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tukar resmi di negara tersebut. Pada saat itu selain mata uang dollar, masih ada mata uang asli masyarakat Camboja yaitu Reel. Penerapan mata uang dollar ini, pada dasarnya tidak menguntungkan, akan tetapi justru menimbulkan pengaruh yang negatif pada perekonomian rakyat kecil di negara tersebut. Buktinya terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Padahal saat misi PBB masih berkuasa, uang mengalir bagaikan air bah, dan semua standar hidup di ukur dengan dollar. Akibatnya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskinpun sangat transparan, karena uang mengalir hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang terdaftar sebagai staf ahli PBB maupun yang berstatus sebagai staf Internasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengalaman buruk ini juga sekarang sedang menimpah masyarakat dengan membuat Pemerintah pusing tujuh keliling.

Imbas dari kekerasan dan penghancuran Timor Lorosa'e pada tahun 1999, juga berdampak pada anak-anak yang seharusnya masih butuh kasih sayang dari orang tuanya. Kejamnya kehidupan anak-anak, juga harus mengambil resiko untuk menghadapi segala tantangan karena beberapa faktor penyebabnya. Diantara anak-anak tersebut, banyak kehilangan orang tuanya karena terbunuh dan rumah mereka telah tiada (terbakar), akibat kekerasan yang terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap hari harus bergumul dengan segala aktivitas yang sebenarnya belum pantas untuk mereka lakukan. Tidak ada lagi belaian, tidak ada lagi dongeng atau nyanyian pengantar tidur, apalagi di suruh untuk sarapan pagi. Anak siapa yang tidak ingin memanggil ibunya, bermanja ria diatas pangkuan orang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tuanya, tentu semua anak menginginkan kehidupan demikian. Namun semua resiko dan tantangan ini, harus terjadi dan di hadapi anak-anak bangsa yang baru merdeka di millenium ini.⁶⁸

Timor Lorosa'e sekarang ini, memang tidak lebih dari sebuah negara baru dengan persoalan kemiskinan dan berbagai persoalan lainnya yang kompleks. Sumber Daya Manusiapun (SDM), masih sangat terbatas untuk menjadi sebuah kekuatan perubahan bagi negara baru Timor Lorosa'e.

3. Dampak Bagi Kaum Pendatang.

Pernyataan opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 januari 1999, dua hari kemudian berbondong-bondong kaum pendatang yang merasa cemas dengan keselamatan diri dan keluarganya melakukan eksodus keluar dari Timor Lorosa'e. Menurut informasi, saat itu, permintaan pesanan tiket untuk penumpang kelas satu dan dua, sisanya antara 40-50 persen. Tapi pada saat kedua opsi dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, calon penumpang harus memesan jauh hari sebelumnya. Warga pendatang di Timor Lorosa'e jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 50.000-an. Sebagian besar pendatang berasal dari NTT, jawa dan Sulawesi.

Umumnya mereka berprofesi sebagai pedagang, dan mendominasi urat nadi perekonomian Timor Lorosa'e. Para Pegawai negeri Sipil (PNS) asal luar Timor Lorosa'e di Dili dan beberapa kota lainnya, juga dirundung

⁶⁸ Majalah *Talitakum*, Dili 2001. *Elit Politik Di Cari Anak Jalanan*. Edisi 25, hlm. 9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

resah. Mereka terutama tenaga disekitar pendidikan dan kesehatan. Bisa dimengerti bahwa merekalah yang setiap harinya berhadapan langsung dengan masyarakat yang mudah emosi, dan tidak tahu menahu dengan kesulitan yang dihadapi oleh tenaga-tenaga tersebut.

Pihak Departemen dan Kebudayaan, dalam bulan januari 1999, beberapa media massa memuat keresahan para pendatang. Dengan situasi yang sudah tidak menentu, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan formulir tawaran bagi para PNS, untuk mengetahui siapa yang mau dipindahkan dari Timor Lorosa'e ke propinsi lain di Indonesia. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan formulir tersebut, hanya dapat memicu persoalan yang lebih berat dikalangan masyarakat, ketika dua kelompok masyarakat yang bertikai tengah mengupayakan kesepakatan atas tawaran Pemerintah Indonesia, yaitu otonomi seluas-luasnya atau merdeka.⁷⁰

Merasa diri tidak aman, kaum pendatang memilih mengungsi dari wilayah Timor Lorosa'e, walaupun masih ada yang ingin kembali ke bumi Lorosa'e, tetapi ada pula yang langsung patah arang. Kondisi tersebut, membuat para pendatang harus di hantui ketakutan, bagaikan berdiri di atas duri. Seperti yang di ungkapkan oleh Zaifruddin pedagang kelontong asal Padang itu. Zaifruddin menyatakan bahwa ia trauma pada saat terjadi kekerasan, karena hanya membawa baju yang menempel di badan. Saat itu

⁷⁰ Hortensio Pedro Viera. *Kendala Integrasi Masyarakat Timor-Timur Ke Dalam Masyarakat Indonesia*. FISIPOL, UGM, Yogyakarta 2000. *Ibid*, hlm 116

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rumah dan toko Zaifruddin di bakar, yang diperkirakan mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Sekarang mereka mengaku bahwa sejak mengalami kerugian sebesar itu, tidak bisa menjalankan usahanya lagi, ungkap Zaifruddin sedih.

Yaman 22 tahun pemuda bermodal ijazah SD dan sedikit keberanian, mengadu nasib dengan menjual kain di kota Dili sejak tahun 1993. Tapi setelah muncul kekerasan tahun 1999, Ia tiba kembali di kota kelahirannya di Ujung Pandang. Menurut Yaman, eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh para pendatang, terjadi karena merasa ketakutan menghadapi situasi yang terjadi.⁷¹

Ribuan manusia berdesakan di pelabuhan Dili, koper, kardus, bungkusan kain, gulungan kasur berserakan memenuhi dermaga. Sedangkan para calon penumpang berdesakan kearah kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, tanpa peduli apakah daya muat kendaraan laut itu melebihi batas maksimum atau masih muat. Sementara mereka yang tidak melakukan eksodus keluar dari bumi Timor Lorosa'e, mencari perlindungan ke Gereja dan Masjid. Wartawan tempo Zed Abidien yang sedang berada ditengah para penggungsi menyatakan bahwa sekitar 150.000 ribu pegawai PLN, para istri anggota brimob, serta wartawan dalam dan luar negeri mengantri pesawat untuk keluar dari Dili. Mereka bertekad untuk keluar secepat mungkin dengan pesawat dan kapal barang, karena daya muat yang sangat terbatas. Termasuk Yusral guru SD I Dili

⁷¹ Majalah *Gatra*, Jakarta 1999. *Panasnya Bumi Lorosa'e*. *Ibid*, hlm 27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang sudah 20 tahun hidup di kota Dili, terpaksa harus angkat kaki keluar dari Timor Lorosa'e. Darah yang terlalu mudah mengalir di Timor Lorosa'e, membuat para pendatang terpaksa mengambil langkah seribu.⁷²

Apapun pilihannya, merdeka atau otonomi sikap mental rakyat Timor Lorosa'e jelas harus membutuhkan transformasi besar. Itu pulalah yang dibutuhkan rakyat Indonesia, guna mengatasi berbagai krisis yang melanda akhir-akhir ini. Tanpa jiwa yang merdeka, rakyat di Timor Lorosa'e atau pun propinsi lain di Indonesia hanya akan terus jadi bulan-bulanan, sasaran, manipulasi, adu domba, diperbudak dan dikorbankan sia-sia oleh elit penguasa. Kemerdekaan pada akhirnya bukan sekedar persoalan kebutuhan fisik, akan tetapi perlu dilakukan juga dengan pembangunan di bidang mental spiritual bagi masyarakat secara menyeluruh.⁷³

⁷² *Tempo*, Jakarta 1999. *Ibarat Jalan Tak Berujung*. *Ibid*, hlm 25

⁷³ Hortensio Pedro Viera, FISIPOL, UGM. *Ibid*, hlm. 121

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

SIKAP DAN KEBIJAKAN PBB TERHADAP DAMPAK REFERENDUM TAHUN 1999 DI TIMOR LOROSA'E.

Secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan penyelidikan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam konteks misi UNTAET, pada tanggal 27 september 1999, United Nation's Human Right Commission (UNHRC, Komisi Hak Asasi Manusia PBB), mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta kepada sekretaris jenderal agar membentuk komisi tempat untuk mengupayakan keadilan. Pada tanggal 10 Desember 1999 kepada dewan keamanan, para pelopor khusus menyebutkan bahwa TNI, bersama milisi melakukan kejahatan termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, termasuk pengrusakan seluruh infrastruktur yang ada. Kurang dari dua bulan kemudian, laporan ICIET (*International Commission of Inquiry on East Timor*), menyeruhkan kepada PBB untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia Internasional, yang terdiri dari hakim-hakim yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili para pelaku kejahatan tahun 1999.

Masyarakat internasional sangat prihatin dengan perkembangan situasi yang terjadi di Timor Lorosa'e, bahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal 23-27 september 1999 menyelenggarakan *special session* mengenai situasi di Timor Lorosa'e. *Special session* tersebut adalah yang keempat sejak dibentuknya pada 50 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dunia internasional terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e sangat serius. Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Indonesia harus membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan "secepat mungkin", dan harus menjalankan proses hukum yang cepat, menyeluruh, efektif dan transparan, yang dapat memenuhi standar internasional tentang pengadilan dan proses hukum yang adil.⁷⁴

Kebijakan Terhadap Orang Timor Lorosa'e.

Baru empat tahun yang lalu militer Indonesia (TNI) dan pasukan milisinya melakukan teror dan penghancuran akhir di Timor Lorosa'e. Akibatnya telah banyak yang diketahui sekitar 70% gedung dan infrastruktur negara Timor Lorosa'e hancur, lebih dari seribu orang terbunuh, perempuan yang jumlahnya belum diketahui diperkosa dan ratusan ribu orang terusir dari tempat tinggal mereka. Kekejaman tersebut berpengaruh pada pembentukan misi UNTAET dan merangsang upaya untuk menjamin pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Timor Lorosa'e.⁷⁵

Hancurnya gedung dan infrastruktur negara Timor Lorosa'e, dapat menarik perhatian dari negara-negara donor besar, yang dapat memberikan baik secara fisik maupun secara material, melalui misi PBB untuk pembangunan kembali Timor Lorosa'e. Adapun negara-negara donor sebagai berikut:

⁷⁴ Media Internet SOLIDAMOR, Dili 1999. *Keadilan Untuk Timor Lorosa'e*. hlm. 8

⁷⁵ Buletin *La'o Hamutuk*, Dili 2001. *Keadilan Untuk Timor Lorosa'e*. *Ibid*, hlm. 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan salah satu donor terbesar untuk pembanguna Timor Lorosa'e. Banyak organisasi-organisasi non-pemerintah, media elektronik, dan bisnis kecil-kecilan di Timor Lorosa'e. Dana tersebut dapat diperoleh dari *The United States Agency for Internasional Development (USAID)*.

Sejak tahun 1999, kongres Amerika Serikat telah merangsang \$ 25 juta per tahun bantuan luar negerinya, untuk pembangunan kembali Timor Lorosa'e. Selain itu juga telah melakukan pembayaran biaya-biaya untuk para honorer Timor Lorosa'e. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat mempunyai pendapatan ekonomi terbesar di dunia, dan juga merupakan penyumbang iuran terbesar untuk misi pasukan perdamaian PBB sebesar \$ 200 juta untuk anggaran (*United Nation's Trantition and Administration of East Timor (UNTAET)*). Selama masa darurat di Timor Lorosa'e pada akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000, Amerika Serikat dapat menyumbang \$ 36 juta untuk penyediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya melalui lembaga-lembaga multilateral.

USAID telah mendanai beberapa program untuk pekerjaan lokal dan perbaikan infrastruktur dalam skala kecil dengan cara menstabilkan masyarakat lokal setelah penghancuran di Timor Lorosa'e tahun 1999, yang dilakukan melalui penyediaan peralatan dan bahan-bahan yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi non-pemerintah dapat menerima 93% dari jumlah total dana dengan sisanya (\$ 227.000). Hal ini dapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilakukan dengan fokus utamanya kepada pemilihan umum Majelis Konstituante pada bulan Agustus 2001, serta mengenai seluk beluk proses pemunggutan suara.⁷⁶

B. Bantuan Jepang Untuk Timor Lorosa'e.

Jepang adalah negara terkaya di Asia, dan negara terkaya kedua di dunia. Sejak awal dasawarsa tahun 1970-an, Jepang telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi global utama, menentang dominasi Amerika Serikat atas penanaman modal dan pasar global. Jepang adalah salah satu dari lima negara penyumbang terbesar kepada IMF dan Bank Dunia. Dengan demikian, Jepang mempunyai andil terbesar kedua dalam lembaga keuangan Internasional, juga merupakan salah satu donor terbesar didunia serta telah menjadi penyumbang terbesar bantuan multilateral dan bilateral ke Timor Lorosa'e sejak bulan september 1999.

Pemerintah Jepang dapat menyumbangkan US\$ 30 juta dalam bantuan kemanusiaan selama masa darurat setelah referendum. Sebagian dana tersebut dapat disalurkan melalui badan-badan multilateral seperti, program pangan Dunia (WFP, World Food Programme) dan komisi Tinggi urusan pengungsi PBB (UNHC), pemohon gabungan PBB, NGO dll. Pada bulan Desember 1999 dalam konferensi donor untuk pembangunan Timor Lorosa'e, Jepang juga dapat menjanjikan US\$ 100 juta untuk rehabilitas dan pembangunan Timor Lorosa'e periode tiga tahun lebih. Janji tersebut, 90% telah dapat diberikan kepada Timor Lorosa'e. Pada konferensi terakhir dana

⁷⁶ Buletin *La'o Hamutuk*, Dili 2002. *Bantuan Pemerintah Amerika Serikat Untuk Timor Lorosa'e*. hlm. 2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk Timor Lorosa'e yang diadakan di Dili seminggu sebelum perayaan kemerdekaan, Jepang menjanjikan tambahan bantuan US\$ 50 juta untuk tiga tahun mendatang.

Selain itu juga pada bulan Maret 2002, Jepang memberangkatkan 690 Personel Angkatan Darat, Pasukan Bela Diri ([PBD) ke Timor Lorosa'e. Ini merupakan sumbangan terbesar Jepang kepada misi penjaga perdamaian PBB, yang oleh Pemerintah Jepang disebut "prakarsa yang membuka sebuah era baru".⁷⁷

C. Bantuan Portugal Untuk Timor Lorosa'e.

Di seluruh Dunia Portugal biasanya tidak dianggap sebagai suatu negara donor yang besar. Akan tetapi di Timor Lorosa'e, Pemerintah Portugal terlihat sangat mencolok dan berpengaruh, karena menjadi salah satu negara dari tiga negara donor terbesar bagi negeri Timor Lorosa'e, (bersama Jepang dan Australia). Pada tahun 1999, Portugal dapat menyumbangkan US\$ 289 juta untuk bantuan pembangunan resmi di Timor Lorosa'e. Jumlah dana tersebut merupakan 0,26% dari pendapat nasionalnya, lebih rendah daripada rata-rata bantuan negara anggota DAC yang besarnya 0,39% dari pendapatan nasional mereka, akan tetapi hal ini masih lebih besar daripada tiga negara donor penting lainnya untuk Timor Lorosa'e, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Sejak Juni 1999 hingga Mei 2002, ada suatu kantor komisaris dukungan Transisi di Timor Lorosa'e (CATTIL), yang berfungsi sebagai

⁷⁷ Buletin *La'o Hamutuk*, Dili 2002. *Bantuan Jepang Untuk Timor Lorosa'e*. hlm. 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

suatu badan untuk dapat mengkoordinasikan prakarsa-prakarsa yang berkaitan dengan persiapan proses pembangunan. Selama masa transisi, CATTL dapat mengarahkan sejumlah program diberbagai bidang, juga mendukung lembaga-lembaga Internasional. Dana perwakilan bagi Timor Lorosa'e melalui Bank Dunia, lebih dari US\$ 35 juta. Sedangkan dari Portugal sendiri memberikan dana hampir US\$ 10 juta untuk upaya bantuan kemanusiaan multilateral, dan juga US\$ 4,5 juta untuk mendukung InterFET ke Timor Lorosa'e. Selain bantuan bilateral, kepolisian dan militer portugal juga menjadi komponen penting dari pasukan penjagaan perdamaian internasional di bawah InterFET.⁷⁸

Untuk dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif, PBB mengiginkan adanya penambahan militer dan peralatan militer dari Australia untuk pasukan penjaga perdamaian di Timor Lorosa'e, guna mengantisipasi gelombang penyerangan baru dari Indonesia. Seperti yang dikutip *The Sydney Morning Herald* bahwa, PBB berupaya meningkatkan kemampuan pasukan PBB untuk menghadapi penetrasi milisi ke daerah-daerah pegunungan yang bermedan berat.⁷⁹

⁷⁸ Buletin *La'o Hamutuk*, Dili 2002. *Bantuan Portugal Untuk Timor Lorosa'e*. hlm. 9

⁷⁹ Majalah *Suara Timor Lorosa'e*, Dili 2000. *PBB Minta tambahan Militer ke Timor Lorosa'e*. hlm.11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Australia

Australia merupakan salah satu negara yang secara geografis, paling dekat dengan Timor Lorosa'e selain Indonesia. Pada masa Pemerintahan Gareth Evans, Australia merupakan satu-satunya negara di dunia yang secara *de jure* mengakui pengintegrasian Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia. Namun setelah tujuh tahun, Gareth Evans dapat digantikan oleh Alexander Downer, yang justru berpandangan lain terhadap masalah Timor-Timur. Downer mengeluarkan pernyataan yang dapat menyebabkan Pemerintah Indonesia semula kebakaran jenggot. Dalam sebuah Konferensi pers, Menlu Australia itu mengumumkan perubahan sikap politik Australia terhadap penyelesaian masalah Timor-Timur. Dengan kesan berhati-hati Alexander Downer menyatakan bahwa rakyat Timor-Timur harus diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri setelah melewati sebuah periode transisi yang di sebutnya "Paket Otonomi". Hal tersebut merupakan langkah awal yang dapat meluruskan kesalahan-kesalahan Australia dimasa silam. Selain itu, menurut penulis buku *Timor: A People Betrayed* ini, sebagaimana di kutip *Harian Sidney Morning Herald*, bahwa pernyataan Downer secara implisit merupakan penolakan secara *de jure* terhadap pengesahan integrasi Timor-Timur yang dilakukan oleh Pemerintah William Fraser di tahun 1979.

Perubahan sikap Pemerintah Australia ini, yang semula dinilai beberapa kalangan dalam negeri sebagai retorika belaka, justru semakin memperoleh nilai historisnya ketika secara mendadak Pemerintah Indonesia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengumumkan sikap politiknya dengan memberi opsi kemerdekaan bagi Timor-Timur, bila otonomi luas yang usulkannya dapat di tolak oleh rakyat Timor-Timur.

Terlepas dari sikap pro kontra yang muncul dikalangan elit politik Indonesia, satu kenyataan terungkap bahwa, ternyata jarum jam sejarah, bukan dikendalikan oleh Gareth Evans dan LB Moerdani. Gareth Evans kini harus menelan kembali pernyataan bahwa kemerdekaan bagi Timor-Timur adalah hal tak mungkin, karena sejarah perjuangan rakyat Timor-Timur telah menciptakan kemungkinan itu. Meskipun perjuangan tidak berdasarkan suatu kemungkinan, tapi berlandaskan suatu keyakinan.

Ketika pasca-referendum dan terjadi pembumihangusan di Timor Lorosa'e oleh TNI dan Milisi Pro-Jakarta, Pemerintah Australia telah mengeluarkan jutaan dollar Australia (Au\$m) pada periode *Emergency* untuk membantu mengatasi masalah *humanitarian* di Timor Lorosa'e. Kepala Konsulat Australia James Batley menyatakan bahwa Pemerintah Australia memberi bantuan dana untuk Timor Lorosa'e sebesar 150 juta dollar Australia (Au\$m 150). Australia telah memulai misinya di Timor Lorosa'e bukan saja sesudah referendum, tapi jauh sebelumnya yakni 4 atau 5 tahun silam. Untuk tahun 2001, Pemerintah Australia telah mengeluarkan dana sebesar Au\$m 40 juta. Dana tersebut lebih diprioritaskan pada beberapa sektor yang dianggap urgent, seperti: Sektor pendidikan sebesar 11%, untuk pemerintah sebesar 32%, dan 12% untuk kesehatan, sisanya untuk water supplay sebesar 4%, rural development 3%,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

joint donor initiatives sebesar 25%, 5% untuk Humanitarian, dan 8% untuk sektor-sektor lain yang belum di alokasikan⁸⁰

Walaupun Pemerintah Australia membantu Pemerintah Timor Lorosa'e dengan jumlah dana yang cukup besar, akan tetapi persoalan mengenai celah Timor (Timor Gap) belum ada solusi kesepakatan. Timor Lorosa'e sebagai sebuah negara baru yang berdaulat, berhak memiliki batas-batasnya atas darat, laut dan udara. Bagi Timor Lorosa'e, penyelesaian batas negara merupakan implementasi nilai-nilai perjuangan nasional untuk kemerdekaan. Penyelesaian batas negara merupakan kepentingan nasional untuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa, agar memiliki aturan hukum yang mengatur tentang perairan laut dan darat serta melindungi hak negara untuk menggunakan kekayaan alam dan melindungi lingkungan hidup.

Persoalan laut Timor adalah persoalan yang penting untuk menentukan perbatasan antara Australia dan Timor Lorosa'e. Indonesia dan Australia menarik garis batas perairan laut Timor, ketika Timor Lorosa'e masih berada di bawah penjajahan portugis dan pendudukan Indonesia. Sayangnya garis-garis tersebut diterima oleh Pemerintah transisi PBB dan sampai sekarang pun masih digunakan, walaupun garis-garis tersebut tidak mencerminkan kedaulatan Republik Demokrat Timor Lorosa'e. Dengan semangat memperkuat jalinan keamanan, perdamaian, kerjasama, dan hubungan baik dengan Australia, Timor Lorosa'e telah berulang kali

⁸⁰ Majalah *Lian Maubere*, Edisi xxxiv 2002. *Ekonomi Timor Lorosa'e Pasca UNTAET*. hlm. 16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meminta Pemerintah Australia agar membicarakan persoalan batas laut⁸⁰ Timor. Akan tetapi Pemerintah transisi di bawah Pemerintah UNTAET justru sebaliknya berunding dengan Australia untuk tetap melakukan eksploitasi ilegal minyak dan gas di Celah Timor tanpa mengidentifikasi wilayah negara mana dan batas dasar lautnya di mana.

Sejak kemerdekaan Timor Lorosa'e, Pemerintah Australia telah menolak mendiskusikan pembatasan laut. Buktinya Australia dengan tidak bersahabat menakuti Timor Lorosa'e dalam persoalan kesepakatan Laut Timor. Pada bulan Maret 2002, Australia menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) dan Pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB untuk arbitrase in parsial mengenai batas-batas laut. Hal ini bertujuan mempersulit Pemerintah Timor Lorosa'e untuk menggunakan Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa batas laut jika negosiasi Timor Lorosa'e mengalami kegagalan.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan Australia saat ini, masih tetap melanjutkan doktrin penjajah yakni *terra Nullius* (tanah kosong) yang digunakan orang-orang Eropa untuk membenarkan dalam mendiami Australia 200 tahun lalu. Mencaplok tanah dan kekayaan alam dari orang-orang pribumi yang telah tinggal selama beribu-ribu tahun dengan berpura-pura bahwa orang-orang ini bukanlah manusia dan tidak pernah ada.⁸¹

⁸¹ Buletin *La'o Hamutuk*, Edisi 4 2003. *Australia Menghambat Perbatasan*. hlm. 11-12

E. Tanggapan PBB Terhadap Kemerdekaan Timor Leste

Januari 1999 merupakan waktu yang menentukan bagi sejarah perjalanan Timor Leste. UNAMET dengan bantuan sejumlah tentara penjaga perdamaian PBB yang di Komandoi Jenderal Cosgrove dari Australia terus melanjutkan Misinya dengan mempersiapkan pembentukan negara Timor Leste. Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) telah lahir sebagai suatu negara baru di abad milenium ini. Selama 450 tahun Timor Leste di bawah bekas jajahan Portugis, dan kemudian 24 tahun dibawah pendudukan Indonesia itu, lalu di bawah Pemerintahan transisi PBB United Nation Transition Administration in East Timor (UNTAET) dapat dipimpin langsung oleh Dr. Sergio Viera de Mello.

Kemerdekaan Timor Leste telah di terima dari PBB, yang dapat ditandai dengan penurunan bendera PBB. Secara simbolis, Pemerintah transisi PBB di Timor Leste melalui misi UNTAET menyerahkan kunci kantor Markas Besar UNTAET kepada Timor Leste, negara baru yang secara resmi akan menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tanggal 20 Mei 2002. Penyerahan secara simbolis tersebut dapat dilakukan oleh ketua UNTAET Dr. Sergio Viera de Mello kepada Presiden terpilih pertama Timor Leste Xanana Gusmão, di Dili Timor Leste, Kamis (16/5/2002). Secara simbolis kunci kantor ini saya serahkan kepada Presiden terpilih Xanana “kata Dr. Sergio Viera de Mello kepada pers,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

seperti dilaporkan wartawan *kompas* **Rien Kuntari** dari Dili Timor Leste.

Tepat pukul 00.00 Senin tanggal 20 Mei 2002, PBB secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Timor Leste, diawali dengan misa Raya pada pukul 05.30 waktu setempat (03.30 WIB) yang dipimpin langsung oleh Uskup Diosis Dili Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, dan Uskup Baucau, Mgr. Basilio do Nascimento, serta dihadiri 300 Imani. Acara tersebut juga dapat dimeriahkan dengan pertunjukkan tarian tradisional dari 13 distrik, serta pemutaran film khusus Timor Leste. Menjelang tengah malam, diadakannya upacara penurunan bendera Portugal sebagai lambang berakhirnya kolonisasi, dan di ikuti bendera PBB. Pada saat itu, Fretilin secara resmi juga dapat menyerahkan benderanya kepada *Forca Defesa de Timor Leste* (FDTL) atau Angkatan Bersenjata Timor Leste, di mana bendera tersebut yang dapat dijadikan bendera resmi negara Timor Leste.⁸¹

Bendera warna merah-emas-hitam-putih milik Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) mulai menyeruak di antara fajar. Negara baru telah lahir, kabinet baru di bawah komando Perdana Menteri Mari' Alkatiri pun mulai bertugas menjalankan pemerintahan yang solid, melakukan rekonsiliasi dan menampilkan *Good Governence*. Pemerintah baru juga menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Australia mengenai pembagian hasil eksploitasi gas laut Timor. Ketua parlemen Francisco Guterres juga dapat melantik 88 anggota majelis di depan Sekjen PBB Kofi Annan. Anggota majelis yang sebagian besar berasal dari partai Fretilin itu, memutuskan untuk menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi

⁸¹ *Kompas*, Dili 2002. PBB Serahkan kunci kepada Xanaan. hlm.2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Manusia (HAM) PBB, serta mengajukan diri untuk menjadi anggota ke-189 organisasi yang bermarkas di New York. Semua bangsa berkedudukan sama, sehingga pintu PBB terbuka bagi negara kaya maupun miskin, kecil maupun besar “tandas Annan”.

Dunia internasional menyambut hangat kelahiran negara kecil yang tergolong miskin. Megawati Soekarno Putri selaku Presiden RI, dengan jiwa besar datang dan memberikan selamat ketika kelahiran negara Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Kehadiran Megawati adalah sebagai simbol bahwa Indonesia siap hidup secara damai sabagai negara tetangga. Dengan menggenggam sebagai status baru negara merdeka, RDTL bertekad untuk menjadi bagian warga dunia. Dalam lingkum kerjasama regional, Timor Leste menargetkan untuk menjadi anggota bagian ASEAN, walaupun penerimaan anggota baru harus dilakukan melalui konsensus semua anggota.⁸²

⁸² Majalah Republika, Dili 2002. Tetangga Baru Timor Leste.hlm.4

BAB VI KESIMPULAN

Latar Belakang politik referendum tahun 1999 di Timor-Timur, adalah keilegalan kekuasaan Indonesia atas Timor-Timur, yang ditandai dengan di invasinya wilayah tersebut oleh TNI pada tanggal 7 Desember 1975. Sebuah invasi yang dapat memaksa Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 10 resolusi (1975-1982). Resolusi yang pada intinya mengutuk invasi militer dan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik pasukannya tanpa syarat, serta menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Timur.

Sejak dimulainya perang kemerdekaan nasional Timor-Timur yang teratur dan terorganisir di bawah partai Fretilin pada tahun 1974, tidak atau belum ada suatu kesepakatan antara Portugal dan Indonesia di bawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kepastian akan diadakannya suatu referendum bagi rakyat Timor-Timur. Terlepas dari niat baik Pemerintahan Habibie yang tidak ingin generasinya dibebani dengan masalah Timor-Timur, fakta dilapangan tidak merefleksikan apa yang di ungkapkan di pusat.

Proses pelaksanaan referendum tahun 1999 begitu cepat di Timor-Timur, karena saat itu terjadi pergesekan fisik antara pro dan kontra referendum di Timor-Timur semakin meningkat. Hal ini membuat misi PBB yaitu UNAMET mengambil sikap tegas untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mempercepat pelaksanaan referendum, dengan tujuan untuk menghindari meningkatnya jumlah korban yang akan terjadi pada masyarakat sipil.

Dampak referendum tahun 1999 dalam bidang ekonomi dan budaya memang cukup signifikan bagi Timor Lorosa'e.

- Dalam bidang ekonomi; bahwa hancurnya perekonomian dan infrastruktur di Timor Lorosa'e menyusul konsultasi rakyat pada bulan Agustus 1999, dapat mengakibatkan tingkat aktivitas perekonomian di wilayah tersebut merosot tajam. Harga barang meningkat untuk kategori barang dan jasa, sehingga masyarakat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bidang sosial budaya; bahwa dengan adanya kekerasan di bumi Lorosa'e pada tahun 1999, hubungan kekerabatan yang telah berakar antar keluarga terpaksa harus berpisah karena perbedaan prinsip politik.

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai dampak yang terjadi di Timor Lorosa'e, PBB sebagai misi internasional sangat prihatin dengan perkembangan situasi tersebut. Hancurnya bumi Lorosa'e dapat menarik perhatian negara-negara donor untuk memberi bantuan, baik secara fisik maupun non-fisik dari misi PBB, guna pembangunan kembali Timor Lorosa'e.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Primer

- Buletin La'o Hamutuk, 2001, "*Keadilan untuk Timor Lorosa'e*", Dili
- Buletin La'o Hamutuk, 2002, "*Bantuan Portugal untuk Timor Lorosa'e*",
Dili
- Buletin La'o Hamutuk, 2002, edisi 4 "*Australia Menghambat Perbatasan*", Dili
- Jurnal GEV ATIL, 1999, edisi 1,2,3,4 "*referendum di Timor-Timur*", Dili
- Jurnal GEV ATIL, 1999, "*referendum (Otonomi bagian dari NKRI) atau merdeka menjadi negara berdaulat*", Dili
- Jurnal Talitakum 1999, edisi 3,5 "*Tolak Otonomi*", Dili
- Jurnal Talitakum, 1999, edisi 3 "*merdeka siapa takut*" Dili
- Jurnal Talitakum, 1999, "*Stop Kekerasan*", Dili
- Jurnal Talitakum, 2002, "*Perbedaan berunjuk pertikaian*", Dili
- Jurnal Talitakum, 2002, edisi 42 "*Rame-rame klaim Aset*", Dili
- Jurnal Talitakum, 2002, edisi 41 "*Minyak Timor yang selalu menjadi rebutan pihak Asing*" Dili
- Jurnal Talitakum, 2002, edisi 43 "*Ada apa di Ermera*", Dili
- Jurnal Talitakum, 2001, edisi 23 "*Elit Politik dicari anak jalanan*", Dili
- Jurnal Talitakum, 2001, edisi 9 "*Dolar Keberuntungan atau masalah baru*", Dili
- Jurnal Pasti, 1999, "*Suara revolusi dan Demokrasi*", Jakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jurnal CAVR, 1999, "*Timor Lorosa'e Sebuah tragedi Kemanusiaan*", Dili

Kompas, 2002, "*Jangan dibelenggu Masa lalu*", Jakarta

Kompas, 2002, "*PBB Serahkan Kunci Kepada Xanana*", Dili

Majalah Republik, 2002, "*Lepasnya Kerikil dalam sepatu*", Jakarta

Majalah Demokrat, 1999, "*Habibie Mementingkan diri sendiri*", Surabaya

Majalah Demokrat, 1999, "*Timor-Timur Realitas Instruksional*", Jakarta

Majalah Demokrat, 1999, "*Kemana jasa orang tua kami*", Jakarta

Majalah Gara, 1998, "*Panasnya Bumi Lorosa'e*", Dili

Majalah Suara Timor Lorosa'e, "*PBB Minta bantuan Militer ke Timor Lorosa'e*", Dili

Majalah Liar. Maubere, 2002, edisi XXXIV, "*Ekonomi Timor Lorosa'e pasca UNTAET*", Dili

Republika, 2002, "*Tetangga Baru Timor Lorosa'e*", Dili

B. Sumber Sekunder

Germano da Silva Gusmao, Pe. Martinho, "*Bunga Rampai Menyongsong Tahun Pembebasan*", Sahe Institut, Dili

Hill, Hele, Mary, 2002, "*Gerakan Pembebasan Kemerdekaan Timor Lorosa'e*. Australia

Magnis Suseno, Frans, 1999 "*Revolusi Omong Kosong*", Jakarta

Pakpahan, Roy, 1998 "*Mengenal Timor-Timur Dulu dan Sekarang*", Jakarta



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

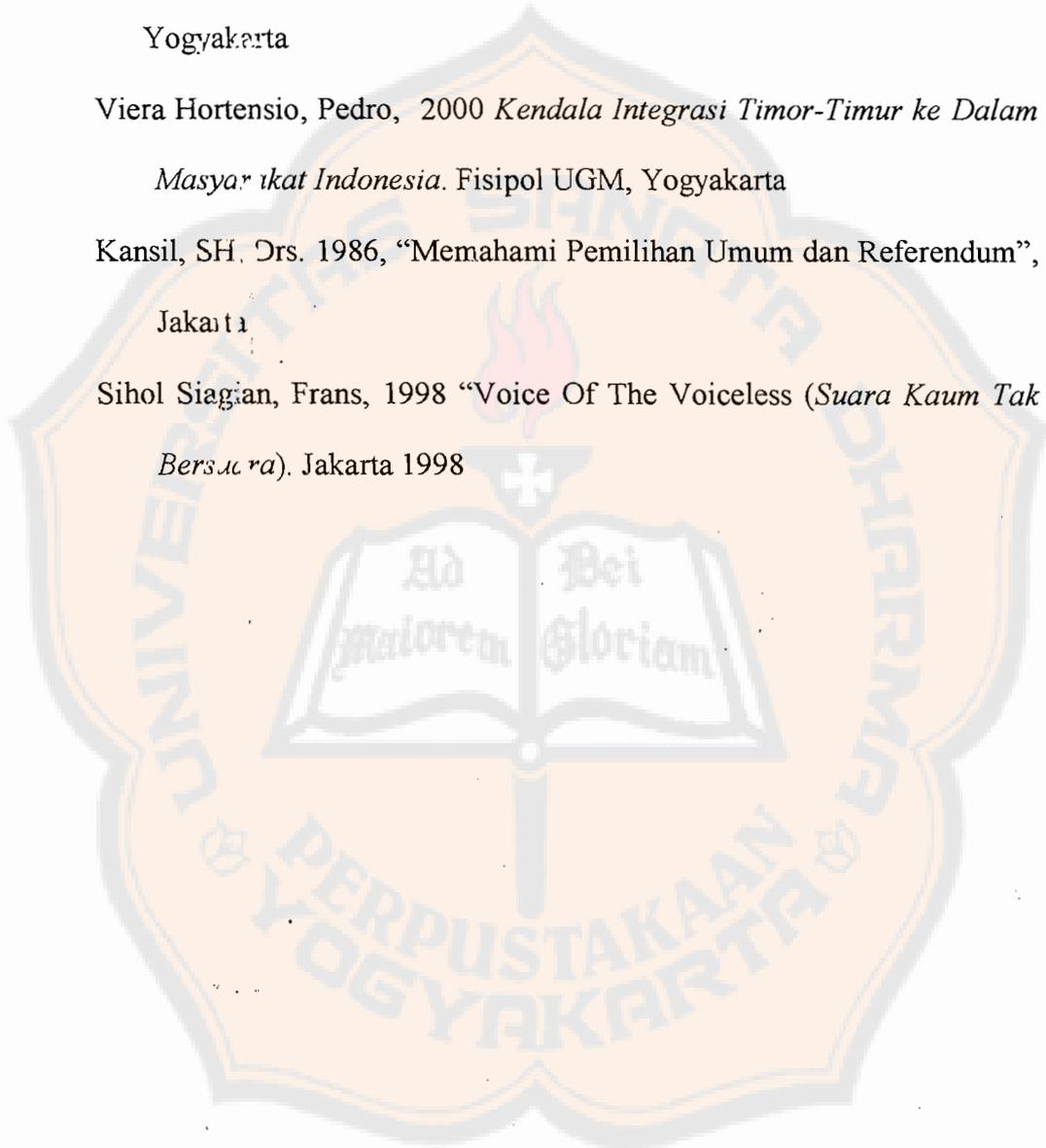
Taylor G. John, 1998 "*Perang Tersembunyi, Sejarah Timor-Timur yang di Lupakan*", FORTILOS, Inggris

Rais, Rapius, 2001, "*Disintegrasi Timor-Timur*", Sanata Dharma, Yogyakarta

Viera Hortensio, Pedro, 2000 *Kendala Integrasi Timor-Timur ke Dalam Masyarakat Indonesia*. Fisipol UGM, Yogyakarta

Kansil, SH. Drs. 1986, "Memahami Pemilihan Umum dan Referendum", Jakarta

Sihol Siagian, Frans, 1998 "Voice Of The Voiceless (*Suara Kaum Tak Bersuara*)". Jakarta 1998



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPPIRAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS DAN SISTEM PENGUJIAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Satuan Pelajaran : SMU
Waktu : 20 menit

Standar Kompetensi	Kemampuan memahami Referendum tahun 1999 dan Dampaknya Terhadap Timor Lorosa'e
Kompetensi Dasar	<p>Kemampuan memahami pengertian dan Arti Referendum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Siswa dapat mendiskripsikan<ol style="list-style-type: none">a. Pengertian dan Latar Belakang Referendum tahun 1999 dan Dampaknya terhadap Timor-Timur.b. Pelaksanaan Referendum tahun 1999 di Timor-Timur.c. Dampak Referendum tahun 1999 terhadap Timor-Timur.d. Sikap dan kebijakan PBB terhadap Referendum tahun 1999 di Timor-Timur.2. Siswa dapat mendiskripsikan sumber dan fakta sejarah Sumber dan Fakta sejarah di bagi dua, yakni sumber primer dan sekunder<ol style="list-style-type: none">a. Sumber di bagi dua:<ul style="list-style-type: none">- Sumber Lisan- Sumber Tertulisb. Fakta di bagi dua:<ul style="list-style-type: none">- Fakta keras- Fakta Lunak
Materi Pembelajaran	Dasar-dasar Penelitian Sejarah
Uraian Materi	<p>I. Pengertian dan Arti Referendum</p> <ol style="list-style-type: none">1. a- Referendum berasal dari bahasa latin yang artinya, <i>re</i>: kembali dan <i>ferre</i>, menyerahkan. Artinya "Penyerahan" kembali sesuatu masalah kepada orang banyak, supaya mereka menentukannya<ul style="list-style-type: none">- Referendum yaitu: lembaga politik yang sering disebut plebisit yakni permintaan untuk memperoleh keputusan dari orang banyak yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

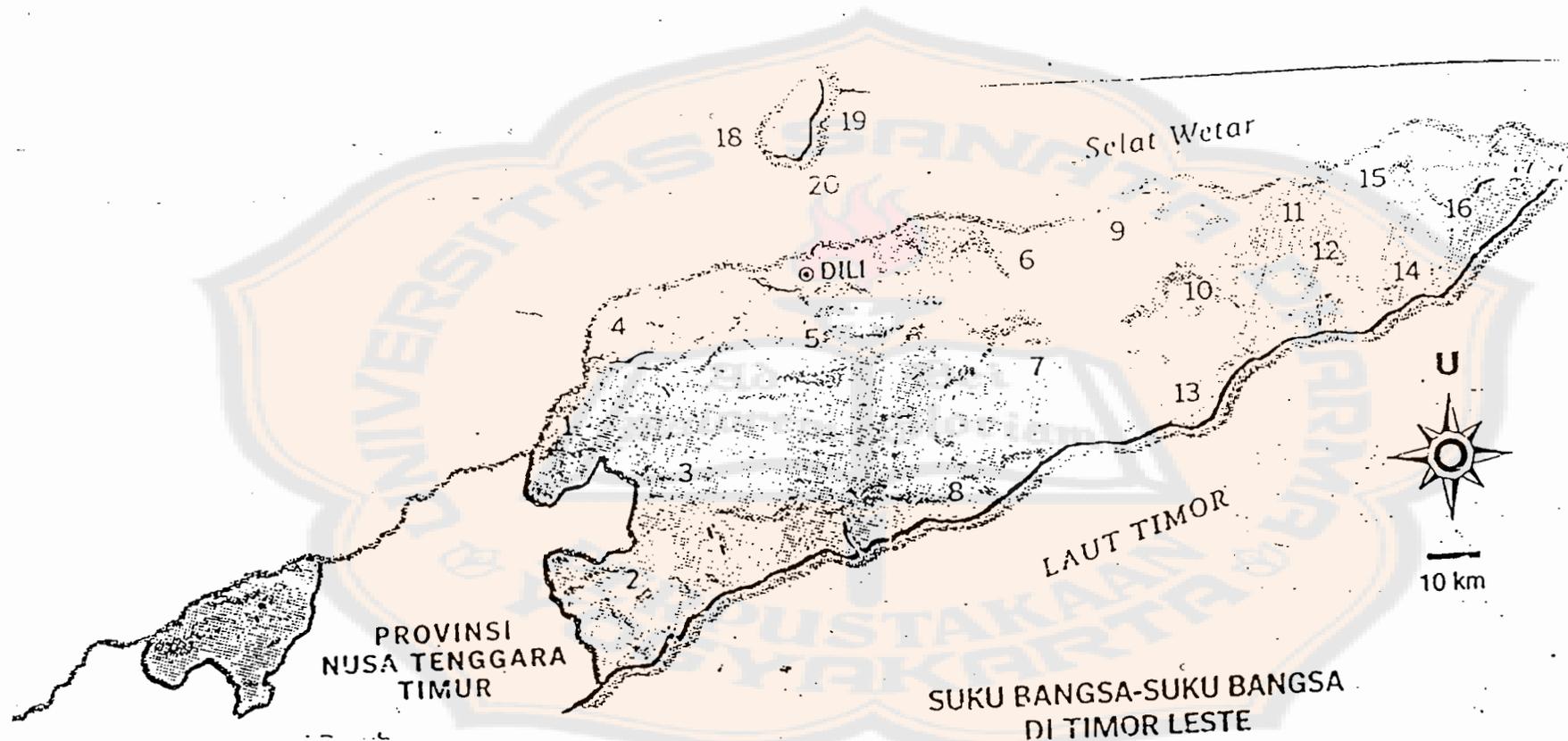
	<p>merupakan anggota masyarakat atau perhimpunan, dan memiliki hak suara untuk menolak atau memperkuat usul yang diusulkan oleh Pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>c. Pelaksanaan Referendum tahun 1999 di Timor-Timur. Adalah bahwa segala sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya; terror, intimidasi, penculiksn, pemerkosaan dan lain-lain.</p> <p>d. Dampak Referendum tahun 1999 terhadap Timor-Timur. Adalah: Suatu peristiwa dapat menghancurkan Infrastruktur dan urat nadi perekonomian sebagai tumpuan hidup masyarakat Timor Lorosa'e.</p> <p>e. Sikap dan kebijakan PBB terhadap Referendum tahun 1999 di Timor-Timur. Adalah bahwa; Sebagai Misi Internasional, PBB mengeluarkan suatu resolusi, untuk mengupayakan Hak Asasi Manusia dan keadilan. Selain itu juga, hancurnya perekonomian dan seluruh Infrastruktur di Timor Lorosa'e dapat menarik perhatian negara-negara donor untuk memberi bantuan, baik secara fisik maupun secara material, guna pembangunan kembali Timor Lorosa'e.</p> <p>2. Mendiskripsikan sumber dan fakta sejarah</p> <p>a. Sumber</p> <ul style="list-style-type: none">- Sumber Lisan yaitu: keterangan langsung yang dapat di peroleh dari pelaku atau saksi dari peristiwa yang terjadi. Misalnya; pelaksanaan Referendu tahun 1999 di Timor Lorosa'e- Sumber Tertulis yaitu: Sumber sejarah yang dapat diperoleh peninggalan-peninggalan masa lampau. Misalnya; Tulisan buku, benda-benda kuno dan sebagainya. <p>b. Fakta Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none">- Fakta keras adalah: fakta yang belum di olah oleh para sejarawan ataupun penulisan sejarah.- Fakta Lunak yaitu: fakta yang sudah di olah oleh para sejarawan, dan sudah merupakan fakta yang siap di tulis.
--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengalaman Pembelajaran	<p>1. Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">- Apersepsi: Guru memberikan pertanyaan tentang materi ini.- Tujuan pembelajaran: Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. <p>3. Kegiatan Inti</p> <p>Orientasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Siswa membaca had out, tentang pengertian dan arti Referendum tahun 1999 di Timor-Timut, kemudian guru menjelaskan tentang materi tersebut.- Siswadiskusi dalam kelompok di kelas tentang soal-soal yang diberikan oleh guru. <p>Umpan Balik</p> <ul style="list-style-type: none">- Beberapa siswa dapat mengemukakan hasil diskusi, dan menjawab pertanyaan dari guru.- Guru menjelaskan kembali hasil diskusi yang disampaikan siswa <p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none">- Guru merangkum materi yang disampaikan.
-------------------------	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SUKU BANGSA-SUKU BANGSA DI TIMOR LESTE



- | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 1. Kemak | 6. Ilimo | 11. Wajima'a | 16. Mambai |
| 2. Bunak | 7. Idate | 12. Samoro | 17. Makua |
| 3. Marobo | 8. Lakalei | 13. Naueti | 18. Adabe |
| 4. Takodede | 9. Galoli | 14. Makasai | 19. Baba |
| 5. Fataluku | 10. Belu | 15. Kairui | 20. Hahak |

Sumber: "Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia" (1996)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jurnal

Tahun I No. 01 Juli - Agustus 1999

GEVATIL

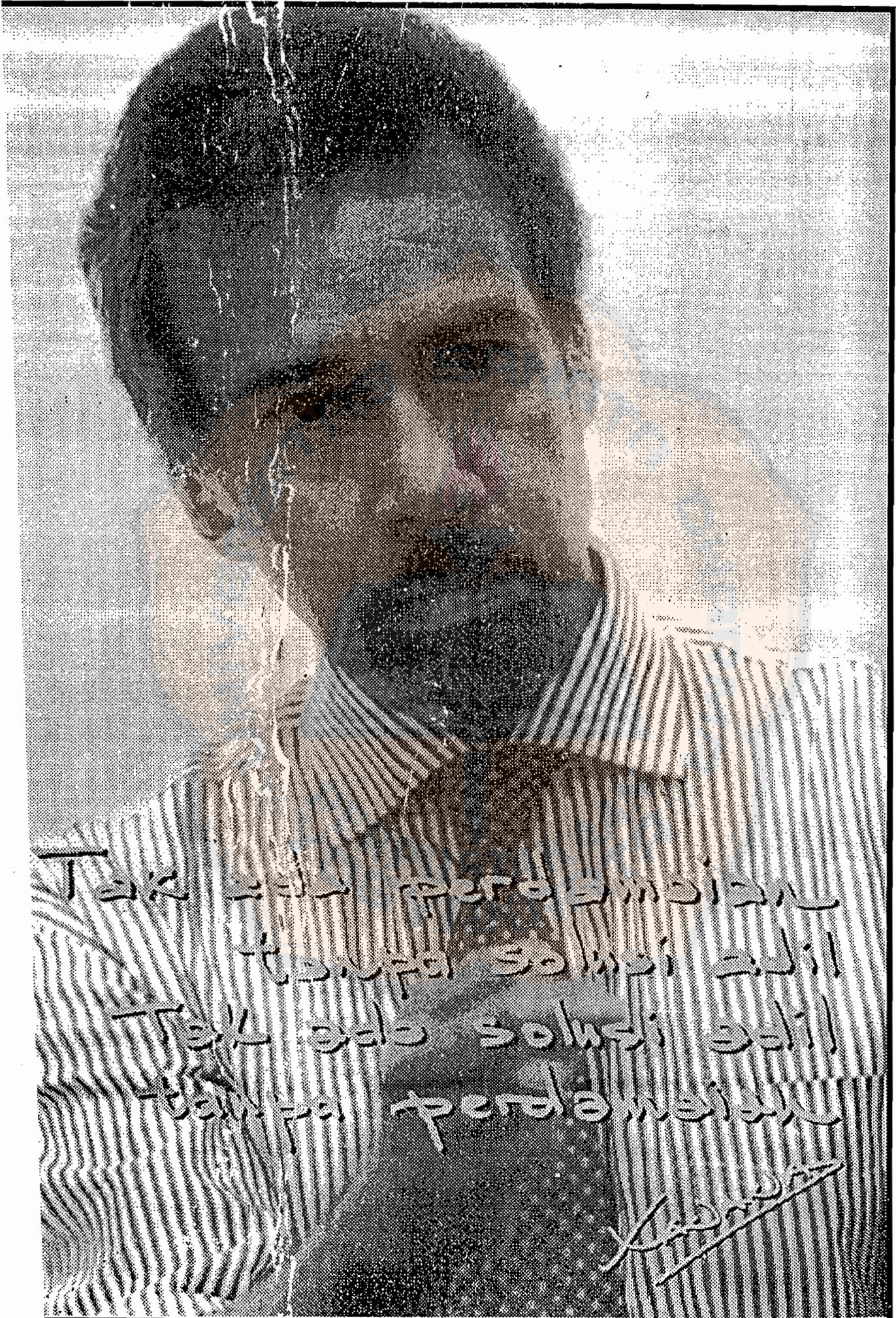
GRUPO DE ESTUDO PARA A VALORIZAÇÃO DE TIMOR LESTE



OTONOMI
(BAGIAN DARI RI)

atau

MERDEKA
(MENJADI NEGARA BERDAULAT)



Tak ada perbedaan
tawar-menawar
Tak ada solusi
tak ada penyelesaian

[Handwritten signature]

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



MERDEKA, SIAPA TAKUT?



tidak ada perang saudara, paling-paling perang batu
(Mario Viegas Carrascalao)

et - April 1999

Rp. 8.500,-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TIMOR LOROSAE

Sebuah Tragedi Kemanusiaan

rep: Etan Website



YAYASAN HAK DAN FORTILOS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TALITAKUM

MEMBURU NEDON DAN TIMOR

TOLAK OTONOMI!



DR. Ana Gomes



DR. Ana Gomes :

"..... berarti Timor Timur Merdeka"

Edisi 5, Juli - Agustus

Rp 8.500,-